



dialog **KEUDE KUPI**

PERSPEKTIF SOSIAL DEMOKRASI RASA KUPI ACEH

TIM PENULIS:
Yuli Zuardi Rais, Rusdi Elusatri, Zulyadi

Editor:
Herlina, SE

**DIALOG KEUDE KUPI
PERSPEKTIF SOSIAL DEMOKRASI RASA KUPI ACEH**

Cetakan Pertama, November 2010

ISBN : 978-979-1157-26-1

Tim Penulis

Yuli Zuardi Rais
Rusdi Elusatri
Zulyadi

Editor

Herlina, SE

Penerbit

Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office	&	Save Emergency for Aceh (SEFA)
Jalan Kemang Selatan II No. 2A Jakarta 12730/INDONESIA		Jl. Poteumeurehom No. 16 Lambhuk – Ulee Kareng Banda Aceh 23118

Layout & Cover

JROHproductions

*Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun,
termasuk fotokopi tanpa ijin tertulis dari penerbit.*

Tidak untuk diperjualbelikan

Kata Pengantar

Syukur kita kepada Allah SWT, yang telah menitipkan segala anugerah dan inspirasi yang senantiasa berkembang sebagaimana perputaran zaman.

Buku ini hadir sebagai dokumentasi perkembangan Aceh yang ditinjau dari sisi sosial demokrasi, sekaligus sebagai potret tumbuhnya sosial demokrasi di Aceh pasca perdamaian Helsinki, 15 Agustus 2005. Sebagai suatu kumpulan serial Dialog Keude KUPI (DKK) yang diselenggarakan diberbagai kabupaten/kota di Aceh. Untuk edisi pertama ini, kami menuangkan 10 tema diskusi, dimana paparan tulisan diambil dari proses langsung dialog serta materi dari pembicara yang hadir dalam diskusi.

Menyoal sosial demokrasi, bukanlah barang yang siap pakai. Namun merupakan sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang diberbagai tempat sesuai perkembangan zaman. Aceh membutuhkan satu solusi yang jitu bagi kesejahteraan rakyatnya. Pergolakan 30 tahun dalam konflik bersenjata telah mengajarkan masyarakat, bahwa perjuangan menegakkan keadilan itu melibatkan seluruh jiwa raga.

Karenanya perdamaian sebagai komitmen baru antara Aceh dan Pemerintah Indonesia, sudah seharusnya diiringi oleh tumbuhnya perspektif sosial demokrasi yang dilandasi oleh kebebasan, keadilan dan solidaritas sosial. Dengan demikian, kita akan melihat Aceh yang bermartabat yang mampu menggerakkan segenap rakyatnya berjuang dimasa perang dan mampu pula menyjahterakan rakyatnya dimasa damai.

Buku ini meninjau sisi lain dari kondisi aktual yang sedang terjadi di Aceh yang didiskusikan bersama *stakeholder* diberbagai



kabupaten/kota di Aceh. Ini merupakan sebuah langkah penting dan bisa menjadi *starting point* bagi perkembangan isu-isu sosial demokrasi di Aceh. Lalu Aceh yang dalam sejarahnya telah bersentuhan erat dengan masyarakat diberbagai belahan dunia seperti masyarakat Eropa, diharapkan mampu mewujudkan pola-pola pembangunan Aceh baru yang memegang prinsip pemerataan dan keadilan sosial.

Tidak hanya dari sisi pemerintahan, lebih jauh buku DKK ini diharapkan mampu menstimulasi masyarakat, membuka wacana-wacana baru dalam gerakan sosial yang efektif, mengorganisir kampanye-kampanye ide-ide sosial demokrasi, dan mendekatkan berbagai solusi kerakyatan bagi perjuangan kepentingan umum yang merupakan bagian integral dan niscaya dari seluruh prinsip sosial demokrasi.

Wacana-wacana tentang sosial demokrasi akhir-akhir ini sedang merambah pada tiga diskursus yang sama-sama menarik. *Pertama*, perspektif baru yang ditekankan adalah untuk melakukan kalkulasi ulang mengenai kontribusi yang bisa diberikan oleh prinsip-prinsip sosial demokrasi (Sosdem) – jaminan sosial, keadilan ekonomi, dan partisipasi politik – untuk bisa memperbaiki kualitas demokrasi yang berlaku secara aktual disuatu tatanan politik tertentu. *Kedua*, kajian yang dipusatkan pada alternatif-alternatif aktual dikerjakan agar keluar dari jebakan kapitalisme dan jalan buntu sosialisme melalui jalur revolusi. Sementara di beberapa Negara Amerika Latin, telah berhasil membangun model gerakan yang inspiratif dengan upaya mereka untuk menyajikan banyak konteks pinggiran dan “lokal” dari eksperimen sosialisme sebagai gerakan sosial-politik. *Ketiga*, secara tegas menunjukkan pilihan-pilihan sistem politik yang tersedia dalam melawan kekuatan pasar, bagaimana Sosdem memberikan solusi yang komprehensif untuk memanfaatkan kebaikan-kebaikan dari keduanya. Adanya rumusan aksi sosial

demokratik untuk membuka jalan menuju kekuasaan, yakni dengan melihat secara riil dibawah kondisi-kondisi seperti apakah perspektif sosial demokrasi dapat menjalankan agenda transformasi sosial di masyarakat.

Membangun perspektif baru dan menyebarkan secara luas kepada masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholder*) itu sangat penting bagi sebuah model pembangunan Aceh yang damai. Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Friedrich Ebert Stiftung (FES) sebagai lembaga yang mengemban tugas melapangkan pengembangan sosial demokrasi diberbagai belahan dunia.

Semoga buku ini dapat memberi warna dan menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan sosial dan bagi kita semua. Terimakasih.

Banda Aceh, November 2010
Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v

Peran Partai Politik Lokal dalam Mendorong Demokrasi di Aceh 1

26 April 2008 di Sigli, Pidie dengan pembicara: Tbamren Ananda (Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Aceh) dan Tgk. Adnan Beuransab (Juru Bicara Partai Aceh).

EKONOMI ACEH: Mau ke Kiri atau ke Kanan? 9

7 Mei 2008 di Ulee Kareng, Banda Aceh. Pembicara Prof. DR. Said Muhammad, MA (Dekan Fakultas Ekonomi UNSYLAH) dan M. Fadjoel Rachman (Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan)

Peran dan Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2009 19

17 Mei 2008 di Kota Kuala Sim pang di Aceh Tamiang, dengan pembicara: Ani Sucipto (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI) dan Raihana Diani (Aktivis Perempuan Aceh).

Fragmentasi Masyarakat Aceh dan Politik Identitas Lokal 27

31 Mei 2008 di Kuede KUPI Solong Ulee Kareng di Banda Aceh, dengan pembicara: Ridwan H. Mukhtar (Mantan Koordinator Presidium Pusat FORSIMA-Forum Silaturabmi Mahasiswa Aceh dan Ketua Alumni Aceh Young Leaders Programme oleh British Council) dan Cici Farba (Aktivis Perempuan)

Peran Partai Politik Lokal dalam Pendidikan Politik Rakyat 37

24 Juni 2008 di Ulee Kareng di Banda Aceh, dengan pameri: Budiman Sudjatmiko (Fungsionaris DPP PDI-P dan Ketua RepDem) dan Kautsar (Aktivis Partai Aceh).



Kumpulan Foto	55
Quo Vadis Demokrasi Lokal di Gampong	59
<i>22 Agustus 2008 di Takengon, Aceh Tengah, dengan pembicara: Irine H. Gayatri (PUSLIT LIPI Jakarta) dan Muhsin (Ketua DPW PRA Aceh Tengah).</i>	
Banjir Dana di Aceh, Apa Dampak Bagi Pengentasan Kemiskinan?	71
<i>22 August 2008 di Banda Aceh, dengan pembicara: Tenku Kamaruzzaman, SH (Sekretaris BRR NAD-NIAS) dan Tgk. Irwansyah Azwar (Ketua Fraksi PKS DPR)</i>	
Partai Politik Lokal dalam Pusaran Konsolidasi Demokrasi	85
<i>Agustus 2009 di Kuala Simpang, dengan pembicara: Syaiful Bahari (PPR-Ketua Umum Partai Perserikatan Rakyat)</i>	
Prospek Demokrasi Sosial di Tengah Menguatnya Demokrasi Lokal di Aceh	91
<i>Maret 2008 di Kuede Kupi Uleekareng di Banda Aceh, dengan pembicara Ahmad Taufan Damanik (KKSP) dan Agung Wijaya (DEMOS)</i>	
Menggagas Sistem Kesejahteraan Bagi Masyarakat Aceh	105
<i>Juli 2008 di Kuede Kupi Uleekareng di Banda Aceh, dengan pembicara: Sugeng Bahagijo (Associate Director Perkumpulan Prakarsa).</i>	
Daftar Istilah	117



**Peran Partai
Politik Lokal
Dalam Mendorong
Demokrasi di
Aceh**

*Perspektif Sosial Demokrasi
Rasa Kopi Aceh*

Peran Partai Politik Lokal Dalam Mendorong Demokrasi di Aceh

Partai politik lokal merupakan wadah baru bagi kemajuan politik dan demokratisasi Aceh pasca konflik dan bencana tsunami. Ada banyak harapan bagi tumbuhnya partai politik lokal yang mampu menopang demokrasi serta disisi lain sebagai alat politik bagi perjuangan kesejahteraan rakyat Aceh, mungkinkah hal ini terwujud? Ditengah pesimisme masyarakat terhadap partai politik yang seringkali hanya menjadi alat sebagian elit dan hanya berfungsi ketika pesta Pemilu berlangsung.

Melihat persoalan-persoalan yang ada, perlu kiranya untuk memberikan perhatian pada usaha mendorong dimensi-dimensi mendasar keterwakilan politik lokal, lebih dari sekadar Pemilu dan kebebasan untuk membentuk partai. Perlu diingat dalam bentuknya yang sekarang ini, partai-partai justru merupakan bagian dari problem lemahnya representasi politik. Sebagian besar

partai-partai politik kita tidak mewakili gagasan dan kepentingan vital rakyat pada umumnya. Namun perbaikan harus dilakukan di sektor yang strategis ini. Bagaimanapun partai politik masih merupakan instrumen demokrasi yang sangat penting di Aceh.

Selain itu ada dua hal yang juga penting untuk diperhatikan melihat situasi Aceh akhir-akhir ini yang mulai marak dengan berdirinya partai-partai lokal. Pertama, adanya aturan yang jelas dan tegas tentang Partai Politik lokal, selain ketentuan tentang persyaratan, hak, dan kewajiban partai nasional dan lokal. Ketentuan melarang aspirasi separatisme dan sikap yang bermusuhan dan diskriminasi terhadap kelompok lain dapat menjadi bagian dari aturan tentang partai politik lokal. Hal ini penting, karena tanpa kedewasaan dan pengaturan yang jelas, kehadiran partai lokal ini akan menjadi masalah baru bagi kemajemukan itu sendiri. Kedua, pengaturan sistem kepartaian akan menjadi pekerjaan yang mubazir, jika masyarakat sendiri tidak memiliki *political literacy* yang memadai. Bagaimanapun juga pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya tidak dapat hanya terbatas pada tataran prosedural semata. Kita semua mempunyai tanggung jawab berupa peningkatan kesadaran politik rakyat melalui pendidikan politik. Keberhasilan agenda ini diharapkan mampu mengatasi setidaknya meminimalisir kecenderungan *dissilusioned voting*.

Thamren Ananda (Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Aceh)

Adanya partai politik lokal juga nasional, dalam mendorong proses demokrasi di Aceh, secara teori itu memang merupakan suatu proses demokrasi. Karena Partai Politik merupakan sekolah politik, sekolah praxis bagi rakyat pada umumnya dan bagi kader partai pada khususnya yang paling modern. Dalam hal ini, apabila suatu partai politik telah melakukan fungsinya sebagai sekolah



politik, maka bisa dikatakan proses demokrasi telah terjadi. Masalahnya, telah terjadi kecelakaan sejarah di Indonesia, selama pasca kemerdekaan Indonesia sampai pada hari ini, tidak ada partai politik yang berfungsi sebagai jembatan atau alat bagi para elit-elit partai untuk duduk di kursi kekuasaan.

Jika partai politik lokal di Aceh kedepan masih mengikuti jejak sejarah partai politik nasional, maka partai politik lokal tidak mampu mendorong proses demokrasi. Jika pendidikan politik dan kaderisasi dalam suatu partai politik tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah pengotakan-pengotakan ide dan gagasan. Kenapa saya sebutkan pengotakan-pengotakan, karena apabila proses ini tidak terjadi maka rakyat Aceh akan terkotak-kotak kedalam berbagai kelompok yang mendukung partai. Karena rakyat akan memilih berbagai partai politik bukan karena program yang ditawarkan oleh partai, melainkan rakyat akan memilih partai karena lambangnya, karena pengurusnya, karena tokohnya, karena namanya, atau karena ada saudaranya. Jadi, rakyat hanya terjebak pada simbolisme.

Jika berbagai partai politik melakukan pendidikan politik terhadap rakyat, partai politik telah memfungsikan dirinya sebagai sekolah politik, maka rakyat Aceh akan memilih Partai Politik karena programatik yang ditawarkan, karena cita-cita membangun Aceh menjadi lebih baik. Ini yang harus dilakukan oleh partai politik lokal di Aceh, jika kita hendak membawa Aceh menjadi lebih baik, membawa Aceh menuju Aceh Baru yang berbeda dari Aceh masa lalu. Jika berbagai partai politik tidak melakukan pendidikan politik, maka partai politik tersebut akan melakukan berbagai cara yang anti demokrasi untuk memenangkan Pemilu. Contoh, ketika Aceh masih berada dalam situasi yang tidak kondusif, yakni masa DOM, partai-partai politik yang ada saat itu tidak melakukan pendidikan politik terhadap rakyat melainkan melakukan pemaksaan terhadap rakyat untuk memilih salah satu

partai dengan tekanan apabila tidak memilih maka dianggap sebagai separatis.

Apakah kondisi ketika rakyat memilih bukan atas dasar sikap politiknya melainkan atas dasar terror akan terulang lagi pada 2009? Saya kira tidak. Kita tentu saja tidak mengharapkan ini kembali terjadi. Karena partai lokal tidak mungkin melakukan itu. Jikapun partai lokal yang saat ini ada juga melakukan terror politik dalam memenangkan suara rakyat Aceh, maka pepatah Aceh berlaku kembali “taleet kaphe tacok peurangeui” (kejar musuh, ambil sifatnya). Betapa tidak, dahulu semasa konflik bersenjata di Aceh, kita sendiri yang mengejar para pelaku terror terhadap rakyat, tapi kini Aceh memasuki perdamaian malah orang Aceh sendiri yang melakukan teror. Semoga ini tidak terjadi.

Oleh karena itulah partai politik lokal bagaimanapun harus menjadi antithesis, harus menjadi jawaban atas kegagalan yang dilakukan oleh partai nasional selama ini. Partai nasional telah gagal dalam mewujudkan perdamaian, gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Gagal menciptakan lapangan kerja bagi rakyat, gagal mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis bagi rakyat. Dan banyak kegagalan lainnya yang dilakukan oleh partai nasional selama ini. Lantas bagaimana posisi Partai Rakyat Aceh sebagai salah satu kontestan Pemilu 2009 dan salah satu actor dalam mengisi demokrasi di Aceh.

PRA (Partai Rakyat Aceh) berkomitmen bahwa haram hukumnya bagi kader partai untuk melakukan pemaksaan kehendak politis rakyat. Dan PRA harus menghargai perbedaan pendapat. Karena secara teori, apabila rakyat tidak memiliki alternative pilihan yang banyak, maka itu menunjukkan bahwa telah terjadi kemiskinan politik dikalangan masyarakat. Karena rakyat tidak mempunyai kemerdekaan untuk mengungkapkan berbagai tendensi politisnya, berbagai ide dan gagasannya terhadap perubahan. Oleh karena itu, multi-partai merupakan



jalan keluar yang harus digagas secara bersama-sama. Untuk itu mari menjaga demokrasi yang mulai tumbuh ini agar tidak ternodai oleh tindakan-tindakan terror dan pemaksaan kehendak.

Kemudian hal yang seharusnya menjadi perhatian kita, berjalan atau tidaknya proses demokrasi di Aceh bukan hanya ditentukan oleh berbagai elemen yang ada ditingkatkan kekuasaan tetapi juga dipengaruhi oleh besar tidaknya tingkat kemiskinan di Aceh. Karena bagaimanapun, kemiskinan adalah batu sandungan dalam demokrasi. Apabila kemiskinan tidak ditanggulangi, maka percuma kita hari ini berbicara mengenai perdamaian. Karena perdamaian yang sesungguhnya adalah ketika rakyat terbebas dari kemiskinan. Kemiskinan adalah akar dari segala konflik yang terjadi diberbagai belahan dunia. Kemiskinan telah mencetuskan berbagai pemberontakan. Kemiskinan telah menggerakkan berbagai tindakan criminal di tengah masyarakat. Oleh karena itu jika kita menghendaki perdamaian di Aceh tetap langgeng, maka jalan satu-satunya adalah mencari jawaban dari berbagai problem kemiskinan yang terjadi di Aceh. Dan tanggung jawab dari besar ini ada pada setiap parti lokal yang akan mengikuti Pemilu 2009 kedepan. Kesimpulannya adalah proses demokrasi yang saat ini sedang berjalan di Aceh harus dijaga dengan, pertama pendidikan politik oleh berbagai Partai Politik. Yang kedua adalah peran pemerintah. Dan ketiga adalah bagaimana mengurangi tingkat kemiskinan.

Tgk. Adnan Beuransah (*Juru Bicara Partai Aceh*)

Jika kita berbicara demokrasi di Aceh, maka kita tidak boleh lupa bahwa titik awal proses ini adalah pada 15 Agustus 2005, setelah penandatanganan MoU di Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintahan Republik Indonesia. Maka, salah satu point yang disebutkan dalam butir MoU tersebut, yakni point 1.2.1 "*bingga melahirkan partai politik lokal di Aceh sesegera*

mungkin, tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini. Pemerintah RI yang menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”.

Berdasarkan poin tersebut, yang dijabarkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 pada pasal 75 sampai pasal 95 tentang partai politik. Kemudian dituangkan lagi dalam PP. No. 20 Tahun 2007, tentang partai politik lokal di Aceh. Maka, berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut lahirlah sejumlah partai politik lokal yang ada sekarang ini. Artinya, ada korelasi antara peran pemerintah dan partai-partai politik dalam menjamin terwujudnya demokrasi di Aceh. Proses demokrasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari partai lokal yang telah terbentuk ini saja, melainkan juga dibutuhkan kemauan politik dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan Aceh, bahkan hingga ke tingkatan terkecil yakni pemerintah kecamatan. Jika kerjasama ini sudah terwujud, maka demokrasi akan berjalan di Aceh. Tetapi jika upaya demokratisasi Aceh hanya datang dari partai politik lokal semata, akan terjadi kesenjangan. Artinya terjadi ketidaksesuaian proses demokrasi di Aceh. Sebab seperti yang kita lihat sampai hari ini, di lapangan masih saja terjadi intimidasi, penurunan plang nama partai, dan lain-lain. Oleh karena itu harus dibangun suatu komunikasi yang intens antara para pihak. Terutama antara pihak partai lokal dengan pihak keamanan, baik kepolisian, dan militer.

Dialog Kuede KUPI tanggal 26 April 2008 di Sigli, Pidie dengan pembicara: Thamren Ananda (Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Aceh) dan Tgk. Adnan Beuransah (Juru Bicara Partai Aceh).



**EKONOMI
ACEH:
Mau Ke Kiri
atau
Ke Kanan?**

*Perspektif Sosial Demokrasi
Rasa Kopi Aceh*

EKONOMI ACEH: Mau Ke Kiri Atau Ke Kanan?

Melepas Aceh dari Ketergantungan

Pembangunan dan perekonomian Aceh lebih banyak dimotivasi oleh pihak luar “apa yang kami peroleh kalau kami menerima proyek yang anda bawa”. Keterpurukan ekonomi sudah berlangsung sejak konflik dan bencana tsunami. Memasuki era rekonstruksi dan rehabilitasi menciptakan pondasi ketergantungan bantuan, kemudian proses ini diperkuat lagi dengan Memorandum of Understanding Helsinki 15 Agustus 2005.

Menggeliatkan perekonomian Aceh bukanlah hal yang mudah. Banyak aliran dana ke Aceh belum menunjukkan perbaikan di sektor riil, normalisasi kehidupan sosial masyarakat belum diikuti dengan perbaikan dan penciptaan lapangan kerja. Sampai saat ini, sektor ekonomi andalan adalah properti sesuai kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh.

Disamping itu, ada keinginan kuat dari Pemerintahan Aceh untuk menggerakkan iklim investasi. Beberapa langkah telah dilakukan, mulai dari *roadshow* ke luar negeri sampai penandatanganan MoU oleh investor asing. Tetapi hal ini masih terganjal dengan memburuknya situasi Aceh. Perdamaian yang mulai bersemi terusik dengan berbagai aksi kekerasan yang bernuansa politis. Damai tak didasar hati mengakibatkan investor pada posisi *wait and see*.

Mengobati Yang Miskin Dan Melayani Yang Kaya

Benang kusut perekonomian Aceh sejak konflik dan tsunami, menjadi pijakan Pemerintahan Aceh menata ulang konsep pembangunan. Adanya tuntutan masyarakat Lhoknga-Leupung tentang investasi pada industri semen Andalas, adanya tuntutan pemisahan provinsi oleh masyarakat dataran tinggi Gayo, Bener Meriah, Alas, dan Gayo Luas tentang ketertinggalan pembangunan di daerah mereka. Kemudian, persoalan korban tsunami yang menuntut biaya perbaikan rumah berhubung dengan pengalihan kinerja BRR Aceh-Nias kepada Pemerintahan Aceh.

Dengan kompleksitas masalah tersebut, bagaimana perekonomian Aceh bisa dihantarkan oleh pemerintahan Irwandi-Nazar keluar dalam jebakan arus besar yang sering disebut Globalisasi atau Neoliberalisme. Setahun tiga bulan pemerintahan Irwandi-Nazar, belum ada konsep pembangunan yang utuh untuk mensejahterakan rakyat Aceh sesuai dengan janji kampanye dan cita-cita perjuangan semasih dalam payung “Gerakan Aceh Merdeka”. Sekarang semangat nasionalisme Aceh itu sedang berkuasa. Dari rangkaian seminar, diskusi dan workshop belum pernah ada wacana tentang konsepsi pembangunan Aceh entah memang belum ada atau sudah ada tapi tertutup.

Realitasnya, ditengah ketidakpastian ekonomi global pikiran dan praktek yang dilakukan masih berpijakan dengan konsep *mainstream*. Konsep pembangunan *mainstream* ini telah banyak membawa kesengsaraan rakyat. Kita bisa bercontoh dengan kasus Indonesia. Hal yang tidak kita pungkiri Aceh yang didera konflik berkepanjangan dan bencana tsunami butuh konsep pembangunan yang pro modal. Akan tetapi disisi lain, kedikdayaan rakyat sebagai subjek pembangunan itu sendiri perlu *scala of priority*, bagaimana menggabungkan titik-titik kompromis ini sehingga menghasilkan energi baru dalam khasazah *welfare state*?

Said Muhammad

Secara umum yang ingin dicapai oleh sebuah sistem ekonomi adalah apa yang disebut *High Level Implement*. Diantaranya adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang banyak, menciptakan stabilitas harga sehingga tidak terjadi inflasi dan deflasi yang tajam, penggunaan sumber dana yang efisien, menciptakan pemerataan pembagian pendapatan sehingga uang tidak hanya beredar diatas saja, sementara yang dibawah tidak mendapatkannya. Dan yang paling penting adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Satu sama lain tujuan ini bisa saling menguatkan dan bias juga saling berkontradiksi. Jika kita bicara untuk konteks Aceh, kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat lamban. Barangkali kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi diatas 9 atau 10 persen, sehingga dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja yang demikian cepat dan menghindari akumulasi tenaga kerja yang menganggur sebelumnya. Kemudian masalah lain yang juga kita hadapi adalah penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dimana pembabatan hutan (*illegal logging*) yang merajalela, sehingga terjadi malapetaka seperti banjir dan sebagainya.

Kemudian ketidakmerataan pembangunan seperti terjadi antara kabupaten-kabupaten yang berada di kawasan barat-selatan dan pesisir pedalaman, sehingga kondisi ini menjadi salah satu hal yang sangat peka selama ini. Masalah lain yang juga timbul adalah lemahnya kualitas dari *service public* dan rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur serta tingkat pembangunan yang lamban. Dan terjadi kondisi lain yang sangat ekstrim dimana muncul wacana pemisahan diri dari provinsi induk. Kondisi ini berpotensi terjadinya *horizontal conflict* antar sesama orang Aceh. Oleh karena itu kondisi ini perlu dikaji dan kita cermati bersama, mencari solusi yang tepat terhadap berbagai masalah dan menjadi tanggung jawab besar dari Pemerintahan Aceh. Untuk menanggulangi kondisi ini ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Pertama, menekan angka kemiskinan dimana angka kemiskinan saat ini berjumlah 25 persen. Dan kita juga harus menekan angka pengangguran. Solusinya adalah dengan melakukan penanaman investasi baik investasi yang datangnya dari luar maupun dari dalam.

Kemudian melakukan revitalisasi baik di sektor pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Dan saya kira yang sangat penting tentu saja adalah bagaimana membuka akses yang besar untuk sektor kesehatan dan pendidikan bagi rakyat demi meningkatkan sumber daya manusia kita sehingga kita mampu dan siap menghadapi proses globalisasi saat ini terjadi dengan tangguh.

Kita tentu tahu bahwa banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh selama ini, tapi kita harus mengakui bahwa apa yang dilakukan belum mampu menemukan formula yang tepat untuk menyelesaikan berbagai problem di Aceh, barangkali hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana memperoleh data yang akurat mengenai berbagai problem yang kini dihadapi oleh rakyat Aceh, mungkin sudah dilakukan proses pendataan ini, tapi tentu saja kita berharap bahwa data ini tepat dan benar.



M. Fajroel Rahman

Problem sebelum reformasi sepuluh tahun yang lampau adalah persoalan kemiskinan dan yang kedua adalah ketimpangan sosial, sepanjang masa Orde Baru berkuasa hingga kejatuhan Soeharto, kemudian sepanjang sepuluh tahun terakhir persoalannya tetap sama yaitu abadinya kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kita ambil saja contohnya, sepanjang dua puluh sembilan tahun Orde Baru berkuasa hingga kemudian pasca Orde Baru, yakni masa reformasi dengan empat presiden yang telah berganti, kita melihat bagaimana ketimpangan sosial yang terjadi. Dari data tersebut kita mengetahui bahwa sepanjang 29 tahun pendapatan dari 40 persen terbawah rakyat Indonesia hanya berkisar 20 persen dari pendapatan nasional. Dari tahun 1975 sampai tahun 2004 cuma naik dari 14 persen menuju 20 persen (BPS). Jadi rupanya 40 persen rakyat terbawah ini selama 20 tahun terakhir memang abadi dan hanya memperoleh antara 16 persen sampai 20 persen dari pendapatan nasional. Sedangkan porsi pendapatan dari 40 persen kelas menengah berkisar antara 36, 89 persen dan 37, 13 persen dan porsi pendapatan kelompok 20 persen pendapatan tertinggi; 42, 07 persen hingga 42, 19 persen.

Nah, apabila kita tetap menjadikan dasar sistem ekonomi yang kita anut, ternyata ketimpangan sosial itu akan terus abadi. Dari zaman Orde Baru hingga Orde Reformasi tidak ada perubahan sama sekali. Dan yang lebih parah, ternyata ketimpangan yang terjadi secara nasional mempunyai dampak ikutan yang semakin parah kebawah yakni ketimpangan ekonomi yang terjadi di tingkatan kabupaten/kota. Sebuah piramida sosial yang timpang. Sebenarnya tidak perlu ada data konkret untuk melihat seberapa akut kondisi kemiskinan di Indonesia. Kita cukup melihat dengan kasat mata realitas kemiskinan ini dengan telanjang terjadi di berbagai daerah. Berapa angka bayi yang meninggal karena kekurangan gizi, berapa banyak anak yang putus sekolah, berapa

banyak masyarakat kita yang tidak memperoleh akses kesehatan yang berkualitas. Seharusnya kondisi di atas menjadi lecutan bagi pemerintah kita untuk mengubah hulu ekonomi yang selama ini mereka yakini bisa menyembuhkan penyakit kemiskinan, namun ternyata gagal.

Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Robinson, dia memperlihatkan bahwa sepanjang pemerintahan Orde Baru berkuasa di Indonesia, terdapat empat fraksi modal utama. Pertama, adalah modal asing yang berbentuk penanaman investasi asing. Selain modal ini bisa berbentuk utang luar negeri, dimana kita tahu mencapai 1300 irlu. Modal asing ini juga berbentuk portofolio melalui pasar modal atau melalui pasar uang. Kedua, melalui fraksi BUMN, nilainya yaitu 1200-1500 triliun (bahkan ada yang pernah mengatakan ini mencapai 2000 triliun). Yang ketiga, melalui fraksi modal ABRI, ini diperkirakan mencapai antara 300-400 triliun, tetapi dalam lima tahun terakhir, ketika diberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi berapa sebenarnya nilai modal dari TNI/Polri ini hanya diakui 1 triliun. Kita tidak tahu kemana larinya aset yang selebihnya, karena mereka minta waktu selama lima tahun untuk menghentikan bisnisnya, tapi hingga sekarang belum selesai juga. Terakhir yang ke-empat, adalah fraksinya para konglomerat pribumi. Menurut Robinson, inilah yang membentuk struktur modal sepanjang Orde Baru berkuasa.

Lalu apa yang terjadi sepuluh tahun kebelakang dengan mereka? Ternyata selama sepuluh tahun yang lalu hingga sekarang, itu tidak terjadi perubahan yang signifikan, hanya terjadi pertukaran tempat saja, misal semasa Orde Baru, Abu Rizal Bakri itu orang terkaya yang berada di urutan 50-an, sekarang sudah menjadi urutan 1. Sekarang kekayaannya diperkirakan 54 triliun. Padahal ketika menjabat Menko Ekuin atau Menko Kesra kekayaannya naik hamper 50 kali lipat. Dan yang menarik juga, kekuatan konglomerasi nasional semasa Soeharto itu tergantung dari kekuatan “bapak”nya yakni kekuatan politik,



yaitu PT. Bimantara Citra. TBK yang dimiliki oleh Bambang Triadmodjo membukukan peningkatan laba bersih konsolidasi tahun 2006 lebih dari tiga kali lipat. Sementara itu pendapatan usaha konsolidasinya meningkat 34 persen. Kesimpulannya adalah setelah sepuluh tahun lepas dari “bapak”nya, ternyata konlomerasi ini menjadi lebih sehat.

Bila dua masalah ini saja bisa kita tarik kesimpulan, bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial itu abadi selama 29 tahun, dari tahun 1975 sd. 2006, kemudian yang kedua fraksi modal yang bermain di Indonesia tetap fraksi ini saja yakni modal luar negeri, fraksi modal TNI/Polri, Konglomerasi dan BUMN. Artinya inilah yang dinamakan sistem ekonomi “kanan” atau kapitalistik yang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa dibangun dengan hanya mendorong sebagian elit di atasnya/pengusaha untuk melakukan investasi dan mereka percaya itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Padahal sebagian besar masyarakat dibawahnya tetap merasakan kemiskinan atau ketimpangan sosial. Mereka percaya bahwa *trickle down effect* itu akan terjadi, padahal itu semua adalah omong kosong!

Ironisnya hingga sepuluh tahun pasca reformasi model ekonomi yang gagal ini tetap diteruskan. Pemerintah masih meneruskan gagasan ekonomi kapitalisme ala Orde Baru. Hasilnya adalah angka kemiskinan tetap, kesenjangan sosialnya tetap, kepercayaan bahwa perekonomian harus digerakkan oleh sekelompok elit masih diyakini dengan membuta oleh pemerintah sekarang. Oleh karena itu menurut saya sistem ekonomi Indonesia sebenarnya adalah Soehartoisme tanpa Soeharto. Jadi, kekuatan itu ternyata tidak pernah berada pada kaum reformis, reformis telah gagal, oleh karena itu semua kaum reformis harus kembali berpikir ulang bahwa sekali lagi kita harus merebut negara, karena kalau tidak ekonomi kita akan tetap berada di “kanan”.

Lantas seperti apa ekonomi “kiri” yang kita dengung-dengungkan selama ini? Ekonomi kiri adalah ekonomi yang memadukan antara gagasan pasar, tetapi tetap percaya bahwa intervensi negara dalam perekonomian adalah penting. Ekonomi kanan hanya percaya pada hak sipil dan politik itu dilindungi oleh negara, sementara ekonomi, social, budaya itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Itulah gagasan yang dikembangkan didalam ekonomi neoliberal. Tapi, perekonomian kiri paling tidak ekonomi kiri tengah itu umumnya bergerak dengan satu kepercayaan bahwa hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya itu sebenarnya satu paket. Semua itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Maka, karena itu apabila pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah jika tidak mau memperjuangkan kelima hak tersebut, artinya masih menjalankan system ekonomi “kanan” (kapitalistik).

Dialog Kuede KUPI tanggal 7 Mei 2008 di Ulee Kareng, Banda Aceh. Pembicara Prof. DR. Said Muhammad, MA (Dekan Fakultas Ekonomi UNSYLAH) dan M. Fadjroel Rachman (Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan)



**PERAN DAN
PARTISIPASI
PEREMPUAN
DALAM
PEMILU 2009**

*Perspektif Sosial Demokrasi
Rasa Kopi Aceh*

PERAN DAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMILU 2009

Rapat Paripurna DPR awal Maret lalu, mensahkan undang-undang Pemilihan Umum tahun 2009. Undang-undang tersebut memberikan jaminan hukum bahwa partai politik harus mencalonkan 30 persen perempuan sebagai calon legislatif. Pasal 15 (d) mensyaratkan, partai politik dapat mendaftar sebagai peserta Pemilu bila menyertakan surat keterangan dari pengurus pusat parpol tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Sedangkan pasal 56 menyebutkan, daftar calon yang diajukan Parpol memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Selain itu, pasal 58 ayat 2 menyebutkan, dalam setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan bakal calon. Ketentuan ini berlaku untuk bakal calon di tingkat DPR, DPR provinsi, hingga DPR kabupaten/kota. Dengan demikian undang-undang tersebut merupakan pencapaian penting perjuangan perempuan secara nasional sejak Pemilu tahun 1999.

Perempuan Aceh juga demikian sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Perempuan Aceh malahan membentuk sebuah partai politik perempuan sebagai alat perjuangan hak-haknya dan lebih jauh untuk membangun Aceh masa depan. Partai Politik perempuan ini tidak hanya mengurus persoalan perempuan saja, para pengurusnya tidak bias gender dan laki-laki juga duduk sebagai fungsionaris partai tersebut.

Dengan adanya peluang-peluang di atas, bagaimanakah peran dan partisipasi politik perempuan secara umum dalam Pemilu. Akankah perempuan tetap sebagai pemilih pasif yang dibutuhkan saat pencoblosan pada 5 April 2009. Setelah itu kembali lagi dalam mata rantai *second class* dalam budaya patriarki. Bagaimana kesiapan masyarakat sipil yang menginginkan perubahan selama ini menyuarakan hak-hak perempuan melihat peluang tersebut? Hal ini pernah dibuktikan atas kegagalan aliansi masyarakat sipil mengkampanyekan “perempuan pilih perempuan”, pada Pemilu 2009”.

Belajar dari pengalaman Pemilu 2004, perlu adanya pengawasan terhadap implementasi undang-undang tersebut. Disisi lain, mengambil peluang calon legislatif disetiap tingkat daerah pemilihan dengan penguatan sumber daya manusia. Berubah dari mayoritas massa pemilih menjadi pilihan massa mayoritas.

Moderator: Afrizal Rozi (FRAT)

Selamat sore hadirin semuanya, pada kali ini kita telah hadir dua orang narasumber yang akan memaparkan pemikirannya mengenai tema “Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 2009”. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Ani Sucipto (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI) dan Ibu Raihana Diani (Aktivis Perempuan Aceh).



Ani Sucipto (*Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI*)

Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan dalam diskusi kali ini. Jika kita ingat semenjak tahun 2003 yang lalu, banyak sekali dorongan dari berbagai pihak yang mendorong kaum perempuan untuk terlibat dalam ranah politik. Padahal seperti kita tahu bahwa dalam politik itu banyak sekali kita melihat berbagai kecurangan, korupsi, dan beberapa waktu lalu kita melihat ada politisi perempuan Pakistan Benazir Bhutto yang meninggal dibunuh. Mungkin kita berpikir bukankah lebih baik perempuan berada dalam ranah domestic saja ketimbang terlibat jauh kedalam ranah publik. Bukankah lebih nyaman tinggal di rumah daripada berpolitik?

Itulah gambaran politik yang dipertontonkan kepada kita selama ini. Tapi harus diingat bahwa sebenarnya kaum perempuan yang tinggal di rumahpun sesungguhnya sudah melakukan tindakan politik, karena makna politik itu sendiri sesungguhnya adalah cara kita dalam mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Artinya hampir setiap hari kita melakukan tindakan politik. Politik adalah tindakan yang dilakukan mulai dari hal kecil di rumah yang bersifat non-formal hingga ke tingkatan yang lebih tinggi di tingkatan negara atau disebut juga dengan politik formal. Antara politik non-formal dengan politik formal itu tidak bisa dipisahkan, saling terkait dan saling mempengaruhi.

Saya ingin menunjukkan bahwa betapa tindakan politik sebuah negara dipengaruhi oleh hal yang remeh-temeh. Dulu urusan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan urusan perlindungan anak dianggap urusan ibu-ibu di rumah, urusan domestik keluarga. Tapi, sekarang kita lihat sudah ada campur tangan negara dalam hal tersebut, ini tercermin dengan adanya undang-undang KDRT dan undang-undang perlindungan anak. Kemudian kebijakan politik di tingkatan negara seperti kebijakan

menaikkan harga BBM, memotong subsidi bagi pendidikan itu akan berpengaruh terhadap tindakan politis di tingkatan keluarga. Artinya ada korelasi antara tindakan dalam keluarga dengan tindakan pada tingkatan negara, demikian juga sebaliknya.

Muncul pertanyaan, jika memang politik itu luas dari skala makro hingga ke skala mikro, apa keuntungannya bagi perempuan untuk terlibat dalam politik formal. Kita percaya bahwa perempuan yang berpolitik mempunyai cara pandang yang berbeda dari seorang laki-laki yang berpolitik walaupun tidak selalu berlaku. Salah satu keuntungan dari keterlibatan perempuan dalam ranah politik praktis adalah ketika kaum perempuan bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda yang bisa mewakili kaumnya dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik.

Jika dulu politisi laki-laki tidak mengetahui kontradiksi apa yang sebenarnya dirasakan oleh kaum perempuan, tetapi ketika sekarang perempuan terlibat sebagai pengambil kebijakan, problem-problem yang dihadapi oleh perempuan bisa terakomodir. Apalagi dewasa ini peluang terhadap perempuan untuk terlibat dalam ranah politik formal sudah terbuka lebar, perempuan bisa terlihat sebagai anggota Partai Politik, mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif, sebagai pemantau Pemilu dan lain sebagainya.

Peluang keterwakilan perempuan harus dimanfaatkan. Apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, bahwa setiap Partai Politik yang didirikan harus menyertakan perempuan dengan kuota 30 persen. Ditambah lagi Pemilu dengan undang-undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 menempatkan perempuan dalam urutan 1:3 (satu banding tiga) dalam formasi Caleg Legislatif dari setiap Partai Politik kontestan Pemilu 2009. Artinya ini menutup peluang bagi penempatan perempuan untuk berada di urutan terakhir dalam Pemilu.

Jika dulu posisi perempuan selalu berada di posisi nomor buncit, tapi sekarang sudah ada aturan tegas dalam undang-undang yang mengatur itu. Aturan afirmatif ini harus dimanfaatkan benar-benar oleh kaum perempuan sebagai jalan untuk terlibat secara langsung dalam ranah politik praktis.

Raihana Diani (*Aktivistis Perempuan Aceh*)

Bicara tentang partisipasi perempuan Aceh hari ini, tentunya ruang partisipasi perempuan ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang dimana sebenarnya partisipasi perempuan Aceh itu sudah dimulai. Dimana adanya ratu yang memerintah pemerintahan Aceh dahulu dan adanya para pahlawan yang melawan penjajahan dari kalangan perempuan. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya partisipasi perempuan dalam ranah publik sudah dimulai dari dahulu.

Hanya saja kemudian muncul fase dimana terjadinya peminggiran kaum perempuan dari ranah politik. Dan ini tidak hanya terjadi di Aceh saja tapi juga terjadi di belahan bumi nusantara lainnya. Kaum perempuan menjadi termarginalkan. Kondisi ini pada akhirnya diterima sebagai sebuah keharusan oleh masyarakat hingga lahir budaya patriarki yang menempatkan kaum perempuan sebagai warga negara kelas kedua.

Dewasa ini kemungkinan perempuan untuk terlibat secara aktif dalam ranah publik kembali terbuka. Fase perdamaian yang terjadi di Aceh pasca MoU Helsinki juga telah membuka ruang bagi keterlibatan perempuan. Dimana sudah adanya kaum perempuan yang mencalonkan dirinya sebagai wakil walikota dan berbagai posisi politis lainnya. Ruang ini sudah terbuka lebar, namun harus diakui partisipasi perempuan masih sangat kurang.

Kalau kita melihat kenapa partisipasi perempuan masih kurang, ada persoalan pokok yang dihadapi kalangan perempuan di Aceh, yang pertama adalah masih kuatnya budaya patriarki, pola pikir dari masyarakat kita masih menganggap bahwa wilayah politik itu masih sebagai wilayahnya kaum laki-laki bukan wilayah perempuan. Kedua, problem yang sangat berpengaruh sekali terhadap keterlibatan perempuan adalah problem kemiskinan.

Kemiskinan yang mencegah keterlibatan perempuan dalam ranah publik. Artinya kemiskinan telah membuat akses bagi kaum perempuan untuk mengecap pendidikan tinggi akibat tidak mampu membiayai pendidikan. Dan yang terakhir adalah persoalan militerisme. Walaupun intensitas konflik sudah berkurang di Aceh, tetapi harus diingat kita masih berada dalam fase transisi. Kita belumlah berada dimana konflik sudah tuntas sepenuhnya. Budaya militerisme masih kuat, ini bisa dilihat dari tingkat kriminalitas masih sangat tinggi.

Kemudian peraturan-peraturan yang lahir, masih belum berpihak pada perempuan. Ini adalah wajah baru dari budaya militerisme. Kalau di daerah lain kita melihat masih adanya Perda yang melarang perempuan untuk keluar malam hari. Di Aceh adanya perempuan yang tidak memakai jilbab langsung dirazia. Ini adalah salah satu factor yang menghambat partisipasi aktif perempuan dalam ranah publik.

Kemudian ada data yang menunjukkan keterwakilan perempuan Aceh dalam wilayah politik formal masih sangat kurang. Di parlemen misalnya, tahun 1999 sd. 2004 dari 55 orang anggota DPR, hanya ada 5 orang perempuan. Artinya hanya ada 0, 1 persen perempuan yang duduk di parlemen Aceh. Lalu dar 2004 sd. 2009, hanya ada 3 orang perempuan. Berkaca dari realitas ini, maka menjadi wajar kemudian kebijakan-kebijakan yang lahir tidak berpihak pada kaum perempuan.



Ketika kita berbicara mengenai banyaknya problem perempuan Aceh, tapi disisi lain telah terbuka ruang yang lebar bagi keterlibatan perempuan. Tinggal bagaimana kaum perempuan sendiri untuk memanfaatkan ruang-ruang ini atau kita membiarkan saja ruang-ruang ini diisi oleh orang lain yang tidak memiliki perspektif perempuan. Ketika kita membicarakan hal ini, muncul pertanyaan: apa yang mesti kita lakukan? Hal pertama yang mesti kita lakukan adalah konsolidasi perempuan di berbagai tingkatan. Kemudian melakukan pendidikan politik bagi perempuan, mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam berbagai organisasi masyarakat. Dengan tiga langkah ini saya kira era baru perempuan Aceh akan kita rengkuh.

Dialog Kuede Kupi tanggal 17 Mei 2008 di Kota Kuala Simpang di Aceh Tamiang, dengan pembicara: Ani Sucipto (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI) dan Raihana Diani (Aktivis Perempuan Aceh).



**Fragmentasi
Masyarakat
Aceh Dan
Politik Identitas
Lokal**

*Perspektif Sosial Demokrasi
Rasa Kopi Aceh*

Fragmentasi Masyarakat Aceh Dan Politik Identitas Lokal

Penyerangan kantor KPA (Komite Peralihan Aceh) yang menewaskan 5 orang di desa Meurah Pupok kecamatan Atu Lintang Aceh Tengah Sabtu (Serambi Indonesia 1/3/2008) dini hari, mengejutkan banyak orang. Peristiwa ini membangkitkan ingatan pada parade kekerasan ketika konflik bersenjata memanas di Aceh (Kompas 12/3/2008).

Konflik horizontal seperti ini berpotensi mendistorsi perdamaian di Aceh. Konflik yang terjadi di Aceh Tengah tersebut merupakan laten jika tidak dikelola dengan benar. Palsunya adalah aktivitas kelompok-kelompok milisi bersenjata bentukan militer yang muncul tahun 2000. Banyak anggotanya direkrut dari “dunia hitam” (premanisme). Dua tahun kemudian kelompok milisi menyatakan Aceh Tengah bukan wilayah etnis Aceh. Ribuan warga asal pesisir timur mengungsi ke kabupaten lain akibat teror penculikan, pembunuhan dan pembakaran rumah oleh ????. Perang saudara pun berkecamuk di wilayah dataran tinggi Gayo tersebut.

Kini damai sudah bersemi di bumi Serambi Mekkah, akan tetapi proses reintegrasi mantan-mantan kombatan tersebut masih banyak mengalami persoalan. Disisi lainnya, Pemerintahan Aceh belum mampu menciptakan lapangan kerja dalam waktu jangka pendek karena masih melakukan upaya pembenahan-pembenahan di segala sektor untuk memacu iklim investasi. Konflik itu kini bergeser dari persoalan ideologi ke sektor ekonomi. Akses terhadap sumber-sumber ekonomi inilah yang bakal mencuat ke permukaan dalam bentuk aneka ekspresi politik identitas dan pemekaran provinsi baru.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menggelar konferensi pers seusai pelantikan bupati Aceh Selatan menyatakan, "Belum waktunya melakukan pemekaran Aceh, nanti kalau pemerintah sudah tidak adil lagi, kenapa harus ditahan". Sementara itu, ketua KPA pusat Muzakkir Manaf menilai, pemekaran ALA dan ABAS itu tidak ada manfaatnya dan yang penting dilakukan saat ini membangun kembali masyarakat Aceh di segala bidang demi kemajuan Aceh (Serambi Indonesia 11/3/2008).

Melihat fenomena di atas, Aceh berada dalam pusaran bandul politik identitas. Kita telah memilih jalan damai menyelesaikan konflik Aceh. Konsekuensi perundingan damai Helsinki menjalankan demokrasi, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan politik majemuk di Aceh. Kemajemukan harus menghasilkan kesementaraan tujuan, tidak ada finalitas.

Artinya, sejauh "politik identitas" hanya bermaksud artikulatif, maka sistem demokrasi harus menampung dan memperlakukannya sebagai *politics of difference*, yaitu suara marjinal yang harus dilindungi. Namun begitu ia mulai bermaksud akumulatif, yaitu berupaya menghomogenkan ruang publik dengan mengintrodusir prinsip-prinsip politik absolut, demokrasi harus segera menolaknya karena ia mengancam prinsip dasar demokrasi itu sendiri: ruang publik tidak boleh dirumuskan secara final. Ia harus bebas dari obsesi-obsesi absolut.

Sistem demokrasi akan membentuk suatu tatanan sivilitas multikultural dan mengakomodir kemajemukan. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 telah menciptakan strategi kebijakan ekonomi, politik dan budaya lokalisme. Lokalisme ini juga pernah dialami oleh provinsi lainnya sejak realisasi Undang-undang No. 32 tahun 2004. Lokalisme ini harus dikelola pada pembentukan identitas ke-Aceh-an dengan mengrekonstruksi aneka asosiasi sosial inklusif lintas etnis dan agama. Sehingga mengeluarkan berbagai strategi ekonomi, politik dan budaya yang dilatarbelakangi prinsip civilitas multikultural.

Ridwan H. Mukhtar (*Mantan Koordinator Presidium Pusat FORSIMA-Forum Silaturahmi Mahasiswa Aceh dan Ketua Alumni Aceh Young Leaders Programme oleh British Council*)

Cita-cita pengelolaan sumberdaya negara dan teologi yang lebih baik lagi seringkali dibelokkan ke lembah kiri dan kanan. Cita-cita tidak berdiri pada jalan yang lurus, mengikuti tata nilai kemanusiaan. Politik identitas dalam demokrasi di Aceh secara aktual terkadang unik, dan tidak dapat diprediksi. Uniknya demokrasi yang ditandai dengan terbukanya peluang (bahkan mengungguli) calon independen bertarung dalam pemilihan kepala Pemerintahan Aceh, 11 Desember 2006 lalu.

Dalam teori kelompok kemudian diramal menjadi identitas tersendiri pasca kemelut nasionalisme (Aceh Vc Indonesia) yang belum tentu juga diperdebatkan, walaupun secara tegas politik identitas dengan wujud penyimbolan, atribut, bahkan bendera telah ditegaskan posisinya sedemikian rupa. Setidaknya, dalam kacamata petarung, arena masih ditunggu penonton, babakan masih banyak tersisa. Naifnya, kekerasan secara fisik dan intelektual sering dilirik sebagai cara melengkapi demokrasi. Politik identitas apabila tidak dipahami dan dikelola dengan baik, maka prahara sosial berlatar kekerasan akan terus mewarnai.

Tak hanya itu, identitas yang terlihat dibayang-bayangi *uniform* militer (isme). Identitas yang terbelah didalamnya juga diramalkan akan terus berbelah diri seperti kepompong demokrasi yang dianggap mungkin, sebenarnya. Dan tidak ada yang mampu meramal apakah identitas yang terbelah tersebut akan memunculkan demokrasi yang member keadilan bagi sebuah cita-cita memastikan kebahagiaan dan kepastian hidup konstituen, mensejahterakan mereka secara lahir dan bathin.

Unik lainnya, ruang demokrasi di Aceh kekinian hampir tidak bersandar pada isu identitas agama, nasionalisme, ataupun keyakinan lainnya. Faktanya Ormas seperti NU ataupun Muhammadiyah, ulama, dan aliran lainnya tidak memanfaatkan momentum ini sebagai sarana politik citra dan politik identitas bagi sebuah adat pencapaian dengan merebut posisi kekuasaan untuk memuluskan penegakan khalifah Islam perspektif lokal ditambah adat.

Beda sekali dengan politik identitas yang berlaku di Libanon. Walaupun tidak mencerminkan situasi dengan Aceh. Dimana perang dengan Israel tersebut, telah memunculkan dominasi kepentingan kelompok social yang berbasis cultural, agama atau partai di Libanon. Munculnya komunitas Kristen, misalnya terpolarisasi pada kelompok Maranit, Ortodoks, dan Katolik. Sementara di komunitas Islam atau Arab muncul kelompok Sunni, Syiah, Duruz, dan Armenia.

Perspektif Aceh yang terlihat justru pertarungan partai yang katanya jelas roda mesin politiknya dan non partai, yang katanya juga tidak terpolo dalam Parpol tertentu, keduanya juga belum tentu tidak berafiliasi kepentingan dan target politik kedepan, teknis maupun strategis. Disadari bahwa partai nasional disatu pihak sepertinya tidak mau melepaskan asumsi atas dirinya: bahwa hanya calon yang maju dengan partai politiklah yang paling “berhak” dan teruji, walaupun kalah nantinya. Artinya identitas calon pemimpin Pemerintahan Aceh masih berkuat pada pusu

yang sama: yaitu mampu karena teruji, yang berempati, dan sebagainya.

Asumsi lainnya, mungkin sebuah ramalan sepihak: yang menguat justru politik identitas atas nama “pemilik perjuangan”, “pemilik sejarah masa lalu”, atau sebaliknya. Saya menyebutkan ini sebuah kemelut nasionalisme yang dipertaruhkan atas semua pihak merasai kadar keadilan dan kadar nista atau tidak nistanya hak-hak kemanusiaan Aceh. Disinilah kemelut politik identitas bersetubuh dengan politik ingatan. Tidak hanya asumsi, para juru kampanye, dan pembawa kabar berita, dengan leluasa telah meriwayatkan kepedihan masa lalu dari panggung ke panggung, di televisi, surat khabar, maupun di radio-radio, tentang sikap juang masa lalunya. Atas riwayat derita dan semangat juang itulah politik identitas yang terpecah-belah dalam berbagai kelompok menemukan tempatnya. Ditambah dengan bumbu sectarian: karena kita satu daerah, kabupaten, bersaudara, maka politik identitas mendapat tempat.

Politik identitas terkadang sering berjalan dengan politik ingatan. Dimana kaum derita dan kaum bahagia hidup pada zamannya masing-masing, pada rasa masing-masing. Penderitaan jika pemilik perjuangan mampu menarik simpul tali jiwa kaum derita menjadi simpul bahagia, hingga menghasilkan kaum yang tersenyum. Dan ini adalah modal.

Seperti halnya dalam filosofi gerak, unsur senyawa akan menyatukan (totalitas) hingga menjadi produk. Maka, jangan heran bila politik identitas di Aceh usai Pilkada sung 11 Desember lalu terbelah-belah dalam banyak rangkaian tetapi masih dalam dua kamar: independen dan non independen, dalam bayangan nasionalisme sempit dan luas.

Apabila politik identitas yang bergerak di Aceh digolongkan pada pergerakan roda demokrasi yang wajar? Dalam masa transisi,

usai dera perih perang dan nyeri tsunami, tentu ini wajar terjadi, lalu? Tugas siapapun untuk memahami ini: masa kita adalah masa transisi, bukan masa menyenangkan diri. Tentu, transformasi tata nilai dalam masa transisi ini belum ada system yang tercipta dan tersedia hingga memunculkan kearifan lokak (*local wisdom*).

Namun, sepertinya tak terencana, politik identitas ternyata sedikit demi sedikit menjurus kepada pertentangan ditengah upaya mewujudkan persatuan Aceh untuk membangun utuh rumah perdamaian. Inilah yang menyakitkan hati! Potensi pertentangan dengan mementingkan kebebasan kelompok daripada kebebasan individu lambat laun makin terlihat mengancam kebebasan memilih satu untuk satu. Demokrasi memang mengakui keragaman identitas kelompok, hanya saja tidak tertutup kemungkinan identitas kelompok dalam kancah politik di Aceh akan menjebak sikap mengedepankan kepentingan kelompok mayoritas dan mengabaikan kepentingan serta kebebasan individu. Karena dalam hitungan politik suara, seharusnya cita-cita harus mampu menyelamatkan setiap satu suara, tidak merusak walaupun hanya satu suara misalnya. Inilah tantangan berat di Aceh bahkan pada Pemilu sebelumnya di nusantara, mungkin ini yang disebut demokrasi atas nama prosudural dan administrasi?

Padahal jauh-jauh hari, sejarah perpolitikan Aceh merefleksi tatanan budaya masyarakat yang santun dan tegas. Santun dikarenakan anjuran ideologi, teologi, maupun santun dalam anjuran maja. Perilaku dan watak buruk dalam bernegara dan masyarakat jauh-jauh hari sudah dipagari dengan tata nilai yang terefleksi dalam banyak hadits maja. Artinya demokrasi Aceh bersandar pada *reusam*, serta nilai-nilai yang ditafsir-taqwilkan dari Islam. Namun kenapa kemudian terekonstruksi sedemikian kontra produktifnya pada abad modern ini?



Cici Farha (Aktivis Perempuan)

Kali ini saya akan membicarakan materi tentang “Fundamentalisme dan Perempuan”, dalam beberapa dasawarsa terakhir ini gejala revivalisme (kebangkitan) agama-agama terlihat muncul diberbagai belahan dunia. Hampir semua agama besar seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha maupun Islam telah memperlihatkan dinamika revivalistis di kalangan penganutnya. Gejala revivalisme ini muncul dalam bentuk intensifikasi penghayatan dan pengamalan agama yang diikuti dengan pencarian dan penegasan kembali nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan.

Ada kalanya revivalisme hanya mengambil bentuk intensifikasi keagamaan yang lebih berorientasi kedalam (*inward oriented*) dan karenanya sering lebih bersifat individual (psikologis, reformasi moral pribadi). Namun dilain sisi, intensifikasi itu juga diarahkan keluar (*outward oriented*), dengan demikian lebih bersifat sosial bahkan politis. Fenomena yang disebut belakangan inilah yang seringkali diberi istilah khas, yakni fundamentalisme. Sebahagian besar kelompok-kelompok “fundamentalis” Islam bersifat moderat dan memperjuangkan aspirasi mereka dalam kerangka sistem yang ada. Sebahagian kecil tetap bergerak kebawah tanah, menyerukan dirobokkannya kekuasaan-kekuasaan yang dianggap sesat dengan kekerasan dan kemudian mendirikan negara Islam (pada level nasional). Bahkan sementara kalangan masih tetap mencita-citakan sebuah “pemerintahan Islam internasional”.

Aktifisme religio ataupun religio-politis dengan protes sosial serta berbagai upaya reformasi, saat ini gerakan Islam kontemporer memiliki spectrum mulai dari yang bersifat moderat dan gradualis sampai ke radikal dan revolusioner. Gerakan Islam kontemporer ini anti *imperialisme* Barat. Pandangan tersebut bervariasi dari kritisme terhadap Barat sampai penolakan dan

serangan terhadap apapun yang biasanya diasosiasikan dengan Barat. Imitasi dan ketergantungan kepada Barat dengan demikian harus dihindari, karena Islam menurut mereka adalah sebuah sistem yang utuh dan sempurna yang berisi segala aspek kehidupan manusia, individual maupun sosial.

Meskipun bersikap tegas terhadap westernisasi, pada umumnya mereka tidak menentang modernisasi. Gerakan-gerakan ini biasanya terlibat dalam organisasi modern dan mendirikan berbagai institusi pendidikan serta pelayanan kesejahteraan sosial, disamping menggunakan pula perangkat teknologi modern dan komunikasi masa untuk menyebarkan pesan-pesan dan memobilisasi dukungan masyarakat. Pesan-pesan tersebut meski berakar pada wahyu dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya jelas ditujukan kepada masyarakat abad ke-21. Pesan-pesan tersebut mengungkap berbagai problem modernitas, menganalisis hubungan Islam dengan nasionalisme, demokrasi, kapitalisme, marxisme, perbankan modern, pendidikan, hukum, masalah perempuan, hubungan internasional dan lain-lain.

Disamping pandangan anti imperialisme Barat, zionisme juga dicuatkan sebagai isu besar oleh semua kelompok “fundamentalisme” Muslim. Yahudi sering disebut dalam konteks kekhawatiran tentang adanya konspirasi untuk menghancurkan Islam. Banyak aspek proses modernisasi berikut sekulerisasi dan rasionalisasi, pergeseran nilai-nilai tradisional, globalisasi ekonomi dan budaya, individualisme, dan hedonisme dilihat sebagai sebuah proses rekayasa. Semua perkembangan tersebut diduga kuat telah direncanakan dan dilaksanakan oleh persekongkolan yang memusuhi Islam dan ingin menghancurkannya. Konspirasi rahasia tersebut diidentikkan dengan yahudi/zionis.

Mengapa fundamentalisme muncul dan menjamur? Lahirnya berbagai gerakan revivalis merupakan reaksi terhadap adanya berbagai krisis (ekonomi, politik, budaya) yang dialami oleh



berbagai komunitas di dunia. Dan fenomena ini ditengarai terkait dengan: sistem ekonomi politik dunia yang tidak adil, kegagalan negara, kegagalan organisasi/mainstream keagamaan, dan lainnya. Fundamentalisme ini antara lain bercirikan: anti sekulerisme, literalis, klaim kebenaran, anti pluralism (communalism, eksklusif), anti kapitalisme, anti komunisme, anti demokrasi, (sebagian menggunakan) kekerasan, anti kekerasan gender, dan lain-lain.

Fundamentalisme sendiri adalah sebuah gerakan protes yang bereaksi terutama untuk menempatkan kembali patriarki dalam konteks masyarakat moderen. Kaum perempuan selama ini selalu diproyeksikan sebagai simbol dan penjaga budaya masyarakatnya. Perempuan dengan demikian merupakan entitas khusus yang dianggap sebagai representasi (cerminan) baik buruknya sebuah masyarakat. Juga diyakini benar bahwa salah satu syarat penting bagi kelancaran proses transformasi masyarakat yang tengah diupayakan haruslah berbasiskan kepada upaya-upaya “mereparasi” kehidupan kaum perempuan terlebih dahulu. Manifestasi keyakinan ini dilakukan pertama-tama melalui penolakan menyeluruh terhadap peri kehidupan perempuan yang dianggap tidak bersesuaian dengan ajaran agama yang “murni”. Reformasi kehidupan perempuan dengan demikian berarti keharusan untuk kembali ke akar ajaran agama yang autentik, baik pada tatanan normative (ajaran) maupun tradisi yang bersifat aplikatif (perilaku keseharian).

Bagaimana dengan kontrol seksualitas dan alat reproduksi perempuan? Perempuan diteguhkan/dikukuhkan untuk menjadi makhluk “kelas dua” di wilayah publik maupun domestik dan keluarga merupakan agenda sangat penting (terpenting). Lalu mengapa kaum perempuan mau bergabung dengan kelompok-kelompok fundamentalis ini? Dikarenakan doktrin keselamatan yang mantap, kenikmatan komunal/psikologis (dipersaudarakan, rasa-hubungan kekeluargaan, ikatan suci), “santunan “

kesejahteraan (layanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi).

Dialog Kuede KUPI tanggal 31 Mei 2008 di Kuede KUPI Solong Ulee Kareng di Banda Aceh, dengan pembicara: Ridwan H. Mukhtar (Mantan Koordinator Presidium Pusat FORSIMA-Forum Silaturahmi Mahasiswa Aceh dan Ketua Alumni Aceh Young Leaders Programme oleh British Council) dan Cici Farha (Aktifis Perempuan)



**PERAN
PARTAI
POLITIK
LOKAL
DALAM
PENDIDIKAN
POLITIK
RAKYAT**

*Perspektif Sosial Demokrasi
Rasa Kopi Aceh*

PERAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENDIDIKAN POLITIK RAKYAT

Sejarah perkembangan partai politik lokal di Aceh sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari peta Pemilu 2009 nantinya, partai politik lokal dan partai politik nasional bertarung memenangkan persaingan dalam merebut hati rakyat untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPRA dan DPRK di Aceh. Sedangkan untuk senayan dan Pilpres presiden dan Wakil Presiden partai politik lokal akan berafiliasi dengan salah satu partai politik nasional.

Kemunculan multi partai di Aceh secara teori makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya, serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan

indikasi kuat bahwa sistem pemerintahan ditangan rakyat sangat mungkin diwujudkan, tanya kenapa?

Pada zaman pemerintahan Orde Baru, peran Partai Politik dalam kehidupan berbangsa ditata dengan perangkat Undang-Undang No. 3 Tahun 1973 Partai Politik yang jumlahnya cukup banyak ditata menjadi 3 kekuatan sosial politik yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Namun penataan ini mengakibatkan tidak berperannya partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi dan pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat dibiarkan mengambang (*floating mass*), penguasa menjadikan partai politik sebagai mesin legitimasi kekuasaan dan asesoris demokrasi.

Wujud mematikan dialektika masyarakat warisan orde baru budaya politik kita sangat identik dengan kekerasan dan pemaksaan kehendak. Padahal mewujudkan *civil society* butuh kesadaran politik dan toleransi politik. Perbedaan merupakan hal yang wajar, tetapi bagaimana manajemen politik untuk memelihara konflik pada tingkatan yang optimal. Sehingga menumbuhkan kompetisi antar kontestan yang sehat.

Dalam kaitan ini, untuk mewujudkan partisipasi politik rakyat dan peran partai politik lokal sebagai kanal-kanal politik rakyat yang maksimal. Maka sedikitnya ada 3 alasan utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik tidak memberikan peluang yang cukup:

1. Dalam masyarakat kita, anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri, bahkan anak-anak mengalami alienasi dalam politik keluarga.
2. Tingkat politisasi sebagian besar masyarakat kita sangat rendah, kalangan keluarga miskin, petani, buruh, nelayan dan sebagainya tidak memiliki kesadaran politik yang



- tinggi karena disibukkan persoalan ekonomi daripada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik.
3. Setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan politik. Pendidikan politik kita lebih merupakan sebuah proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa.

Hal tersebut di atas menciptakan oligarki kekuasaan masih bercokol dan membuat jalannya agenda perubahan total menjadi tersendat. Peran partai politik belum banyak berubah baik program, slogan, dan jargon-jargon kerakyatan, serta isu-isu kesejahteraan hampir mendominasi Partai Politik. Akan tetapi perubahan ekonomi, politik dan sosial belum signifikan yang ditunjukkan dari hasil Pemilu 1999 dan 2004. Momentum Pemilu 2009 ini, dengan keterlibatan partai politik lokal berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mampu mengantarkan Aceh kearah lebih baik dan demokratis. Partai politik lokal bukan hanya mengajak rakyat untuk mencoblos pada hari “H”, kemudian mengalienasi mereka dalam proses pengambilan keputusan publik.

Moderator: Rahmad Djailani (*Sekretaris Jenderal PDRM*)

Assalamu’alaikum Wr. Wb langsung saja kami persilahkan Bapak Budiman Sudjatmiko (Fungsionaris DPP PDI-P dan Ketua RepDem) dan Bapak Kautsar (Aktivis Partai Aceh) sebagai narasumber untuk menyajikan materi.

Budiman Sudjatmiko (*Fungsionaris DPP PDI-P dan Ketua RepDem*)

Saya senang sekali karena saya bisa ke Aceh sebagai satu provinsi yang sangat unik dan mempunyai sejarah yang panjang,

baik dalam fase penjajahan dan juga terlibat dalam konflik-konflik bersenjata. Dan pada akhirnya Aceh menjadi begitu terkenal dimata rakyat International setelah dilanda musibah yang begitu besar yaitu tsunami.

Bagi saya Aceh adalah sebuah tempat/wilayah di republik ini dimana masyarakatnya paling banyak atau lama mengalami penindasan. Kalau dibilang paling banyak belum tentu Aceh yang paling banyak mengalami penindasan/kekerasan, Pulau Jawa dan Bali yang sebenarnya paling banyak. Tapi kalau dilihat dari rentang waktu, Aceh adalah yang paling lama mengalami gerak penindasan yang akhirnya berakhir dengan penandatanganan MoU di Helsinki.

Karenanya kita sangat berharap sekali masyarakat Aceh bisa menarik pelajaran. Seharusnya masyarakat Aceh mampu menarik pelajaran bagaimana seharusnya perbedaan-perbedaan politik agar tidak diselesaikan dengan kekerasan. Karena itu demokrasi hadir di Indonesia pada tahun 1998, pada tingkat tertentu bisa saja memberikan outlet atau kanalisasi bagi proses memperjuangkan kesejahteraan rakyat Aceh.

Saudara-saudara sekalian, karena masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sudah lama belajar dari proses kekerasan. Diharapkan dengan berdirinya partai-partai politik lokal, perbedaan-perbedaan yang ada bisa diselesaikan dengan cara-cara demokratis. Namun tentu saja itu belum memberikan jaminan bahwa rakyat Aceh akan sejahtera, karena menangani perbedaan dan konflik dengan cara demokratis bukan satu jaminan untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Dia hanya memberikan satu kesempatan awal untuk mendudukkan perbedaan dengan cara matang dan dewasa. Itulah demokrasi.



Jadi demokrasi, fungsi utamanya adalah mendudukkan tiap persoalan untuk diselesaikan secara matang dan dewasa. Tetapi, Apakah solusi yang muncul dari aktor-aktor demokrasi bisa memberikan kesejahteraan itu adalah persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan liberalisme politik. Dia harus juga diselesaikan juga dengan kematangan, komitmen, pemahaman bahwa suatu bangsa atau suatu rakyat butuh bukan sekadar dari demokrasi. Yaitu komitmen untuk bahwa demokrasi itu diadakan justru semata-mata untuk menciptakan kesejahteraan itu. Itu yang sedikit, bukan sedikit yang membedakan saya dengan kaum liberal pada umumnya. Yang mengatakan kebebasan untuk kebebasan itu sendiri. Karena itu saya mengatakan kebebasan adalah satu prasyarat awal untuk kesejahteraan.

Saudara-saudara sekalian, lahirnya partai politik dengan demikian haruslah sebuah jawaban/solusi bagi kesejahteraan, bagi pemerataan dan bagi pertumbuhan ekonomi. Tentu peradaban dunia banyak melahirkan pemikir-pemikir, ideologi-ideologi, lahirnya tradisi-tradisi politik yang semuanya mengaku dirinya mampu dan layak memberikan jawaban atas persoalan-persoalan di dunia ini.

Begitu juga bangsa Indonesia dan khususnya rakyat Aceh. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau merefleksi. Saya mau berbicara dalam kerangka umum dulu dalam kerangka ke Indonesiaan dulu. Karena mungkin nanti Kautsar yang akan berbicara lebih dalam konteks Aceh. Lahirnya Republik Indonesia pada tahun 1945 memunculkan lahir banyak Partai Politik. Dan Partai Politik pada waktu itu dan Pemilu tahun 1955 mencerminkan berbagai macam peta afiliasi silang aliran dan kelas. Kelas sosial dalam masyarakat Indonesia. Ada banyak tradisi-tradisi politik yang lahir di Indonesia, ada tradisi liberalisme, tradisi sosialisme, tradisi nasionalisme, Islam modernis, Islam tradisional yang ada di Indonesia. Kemudian terwujud dalam konstelasi Partai Politik

pada tahun 1955. Konstelasi itulah pada masa Orde Baru mau dihilangkan, dibekukan dan disatukan kedalam kerangka tradisi-tradisi pemikiran Developmentalis Kapitalisme. Development Kapitalistik gagal dengan 3 pilarnya yaitu birokrasi, TNI, dan Golkar gagal untuk memaksakan adanya tradisi-tradisi untuk disatukan kedalam tradisi Developmentalis kapitalis.

Kapitalisme yang diperkenalkan oleh Orde Baru ternyata tidak sebagai kapitalisme di negara lain, tidak seperti kapitalisme-kapitalisme negara maju yang banyak melahirkan etos kerja dan produktivitas. Di Indonesia kapitalisme development ala Orde Baru dengan setting politik yang sangat monolitik hanya berhasil menciptakan manusia-manusia yang fragmatis. Hanya mampu melahirkan manusia-manusia yang ingin mencari jalan pintas dan jalan instan untuk meraih kekuasaan dan akumulasi modal. Tapi gagal membangun etos kerja, padahal aspek positif kapitalisme mendorong lahirnya etos kerja dan produktivitas, namun itupun gagal.

Saudara-saudara sekalian, yang lahir lebih banyak fragmatisme, konsumtifisme dan *corruption* (tradisi korupsi) di dalam masyarakat kita, baik dari tingkat elit sampai tingkat massa. Tugas dari kaum moderat di Indonesia dan khususnya di Aceh adalah tantangan untuk pertama-pertama demokrasi itu harus memacu produktivitas dan memacu etos kerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, sembari secara gradual atau radikal menciptakan generasi politik yang baru, yang sadar betul bahwa persoalan-persoalan bangsa ini apabila partai-partai politik menjadi kelompok-kelompok yang sangat kualitatif.

Secara kualitatif kaum tersebut harus menjadi pemimpin bagi bangsa dan rakyat untuk memberikan pendidikan politik. Dengan asumsi masyarakat kita telah terjebak pada fragmatisme, oportunistik dan jalan pintas asumsinya partai politik sebagai



organisasi yang didirikan untuk memimpin masyarakat dan bangsanya, seharusnya dia juga peran untuk menuntun dan mendidik rakyat kebanyakan agar masyarakat yang fragmatis oleh partai politik menjadi masyarakat yang lebih ideologis. Masyarakat yang berpikir jalan pintas dan berpikir jangka pendek, maka oleh Partai Politik harus didik dan diarahkan menjadi masyarakat yang berpikir dan visioner. Saya pikir begitu yang harus saya tegaskan secara normatif yang menjadi tugas-tugas paling dasar dari Partai Politik. Dengan tradisi-tradisi politik yang saya sebutkan hadir dalam masyarakat Indonesia yang juga dulu tercermin dalam masyarakat Aceh.

Maka beberapa pertanyaan hari ini telah muncul dihadapan kita, yaitu berkaca pada peta perpolitikan dan sosiologis di atas, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul bagi kita dan harus dijawab oleh partai politik lokal di Aceh. Karena partai politik lokal di Aceh adalah partai politik yang paling bertanggung jawab untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Partai-partai politik nasional mencoba untuk menjawabnya dengan tradisi yang panjang sejak tahun 1945 kemudian di hancurkan oleh Orde Baru, sekarang lagi mencoba membangun menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan partai politik lokal di Aceh sebagai fenomena politik baru yang asumsinya tidak pernah mengalami tradisi korupsi. Apakah partai-partai yang hadir, partai lokal maupun nasional bisa menjawab pertanyaan mampukah dia mengartikulasikan cita-cita berbagai kelompok di masyarakat (itu satu).

Apa sebenarnya cita-cita dalam masyarakat kita, kalau dalam cita-cita itu kita gambarkan sebagai tradisi politik yang seperti saya uraikan tadi, maka pertanyaannya adalah apakah di Aceh sekarang konstelasi partai politik mencerminkan tradisi-tradisi itu. Apakah PRA benar mencerminkan aspirasi-aspirasi politik dari tradisi yang sosialis? Apakah kemudian SIRA

mampu mencerminkan tradisi-tradisi yang mungkin agak nasionalistis atau liberalistis? Atau apakah juga dengan Partai Aceh apakah mampu mempromosikan tradisi nasionalisme dan tradisi nasionalisme macam apa? Tapi itulah pertanyaan-pertanyaan itu, karena kalau berkaca dari konstelasi partai politik nasional saudara-saudara sekalian.

Ada satu fenomena yang menurut saya begitu memprihatinkan. Banyaknya Partai Politik ditingkat nasional, hari ini ternyata belum mampu mencerminkan artikulasi berbagai cita-cita dalam kelompok masyarakat. Karena apa? karena banyaknya perbedaan atau Partai Politik ditingkat nasional sebagai sebuah konsparasasi lebih mencerminkan fragmentasi, lebih mencerminkan keberserakan-keberserakan dari berbagai macam kelompok yang ada. Karena partai-partai politik yang lahir kurang lebih tidak bisa dibedakan Platformnya satu sama lain. Jadi lebih mencerminkan fragmentasi politik, padahal seharusnya kalau kita berbicara cita-cita politik, seharusnya partai politik bukan mencerminkan fragmentasi tapi menciptakan deferensiasi, apa bedanya dengan fragmentasi deferensiasi? Kalau fragmentasi orang berserak, orang berkumpul dalam banyak kelompok. Tapi kelompok itu didirikan untuk apa, motivasi ideologis untuk apa, tradisi politik apa yang mau dijaga dan dikembangkan itu belum tercermin. Maaf, antara satu Partai Politik satu dengan lain tidak bisa dibedakan, ya ketika korupsi ya sama-sama korupsi.

Kedua, mampukah partai politik itu memegang/menjaga peran sebagai pemimpin politik. Ketiga, mampukah Partai Politik itu mengembangkan serta mempromosikan kebijakan-kebijakan alternatif. Terakhir apakah partai-partai politik yang ada yang beragam ini mampu menawarkan kepada pemilih alternatif-alternatif yang bisa dibedakan antara satu Partai Politik yang satu dengan Partai Politik yang lain.



Di Indonesia, kalau kita mau cek ya pak dan ibu-ibu sekalian Platformnya spectrum partai politik dari flatformnya dari segi ekonomi. Cek dokumen-dokumennya mereka rata-rata spectrum politik kiri tengah. Bicara ekonomi kerakyatan, bicara pro buruh, bicara pro petani begitu ya. Levelnya ada di kiri tengah, semua partai politik Indonesia secara formal dokumentasinya di kiri tengah. Namun dalam prakteknya, kolusi mereka selalu ke kanan dalam pengertian selalu ke kanan dalam segi ekonomi. Mereka cenderung pro bisnis besar, kemudian undang-undang yang dihasilkan lebih banyak yang tidak memihak pada kaum tani dan kaum buruh.

Perpajakan juga masih ragu-ragu menerapkan pajak progresif, jadi ada semacam paradox partai politik yang tercantum dokumen mereka dalam prakteknya. Artinya, fungsi-fungsi Partai Politik yaitu mengembangkan dan mempromosikan kebijakan alternatif itu tidak ada, karena semuanya satu kamar atau satu spectrum. Bagi Aceh menurut saya Partai Lokal harus bisa memberikan jawaban atas ini. Dalam kasus PDI-Perjuangan kita mencoba untuk menjadi alternatif minimal dari positioning politik. Perdebatan dalam rancangan undang-undang, penanaman modal, PDI-Perjuangan dan PKB mencoba menolak itu walau kalah, mencoba untuk berbeda walau kalah, juga dalam rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi kita juga berbeda meskipun sekarang masih bersitegang belum diputuskan.

Rahmad Djailani

Rancangan UUPA dimana untuk Pemerintahan Aceh yang dijalankan tentang pendapatan anggaran daerah mesti lebih banyak digunakan untuk belanja publik ketimbang belanja rutin.

Budiman Sudjatmiko

Saudara-saudara sekalian, pertanyaan bagi politik lokal di Aceh, mampukah dia menjadi kompensasi atau memperbaiki kekeliruan-kekeliruan dalam setting politik ditingkat nasional? Karena itu saudara-saudara sekalian, apabila pertanyaan itu bisa dijawab maka pertanyaan lanjutan adalah, fungsi lain Partai Politik apa? Partai politik juga menjadi wahana utama bagi rekrutmen dan menyeleksi orang-orang untuk menduduki jabatan pemerintahan dan legislatif. Nah rupanya, Saudara-saudara sekalian wahana Partai Politik dalam rekrutmen dan menyeleksi orang untuk menduduki jabatan legislative ini lebih menonjol. Fungsi ini jauh lebih menonjol selama 10 tahun reformasi ini. Ketimbang melakukan fungsi kebijakan alternative, padahal keduanya tidak bisa dipisahkan saudara-saudara sekalian, kalau partai politik hanya menjadi wahana rekrutmen dan penyeleksian orang-orang maka partai politik hanya sekedar semacam komite saja. Komite adhoc bagi promosi-promosi jabatan karier politik.

Rahmad Djailani

Sedikit Bung Budiman, ketika tahun 1999 reformasi terjadi di Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia mempercayai PDI-Perjuangan sebagai partai alternatif, bukan begitu? Artinya kecerdasan rakyat kita dan selalu bilang kepada rakyat kita ayo pilih partai alternatif dan telah memilih partai alternatif tersebut, tetapi situasi tidak berubah justru di Aceh semakin buruk. Darurat militer justru terjadi ketika PDI-Perjuangan berkuasa di Indonesia. Nah, makna pendidikan politik yang mau kita sampaikan dalam posisi seperti itu bagaimana? Kita selalu berteriak ayo rakyat pilih partai alternative, namun ketika telah memilih situasi juga tidak berubah malah semakin buruk.



Budiman Sudjatmiko

Alternatif bisa dua saudara-saudara sekalian. Alternatif memilih sesuatu yang sama sekali baru atau partai yang telah mencederai janji mencoba untuk menkoreksi dan memperbaiki diri. Saya memberi contoh di Jerman, ada partai eks. Penguasa politik di Jerman Timur yang kemudian dianggap sebagai bagian dari kekuatan lama. Kemudian pada waktu itu orang-orang memilih partai berbasis dari Jerman Barat entah itu Partai Kristen Demokrat maupun Sosial Demokrat, kemudian setelah 20 tahun terjadi renifikasi orang melihat partai yang dulu menjadi alternatif dari Jerman Barat kedua partai tersebut gagal untuk mensejahterakan rakyat di Jerman secara keseluruhan.

Jadi kemudian orang kembali melihat alternatif yang lama, alternatif mencoba memperbaiki diri, sehingga sekarang terjadi perubahan perolehan suara dimana partai yang eks penguasa di Jerman Timur memperoleh suara paling banyak. Fenomena politik sebagai sebuah realita politik selalu terjadi. Hari ini partai-partai alternatif dalam konteks nasional harus diakui belum bisa menyakinkan rakyat keseluruhan bahwa mereka sungguh-sungguh alternatif. Mungkin dari segi program bagus, saya yakin orang tidak akan membantah kalau dari program PRD itu bagus. Saya kira waktu itu orang menganggap itu terlalu radikal, ya biasa saja karena kebanyakan waktu itu orang tidur.

Setelah 10 tahun reformasi banyak yang kita suarakan berhasil. Kenapa sebuah kebijakan alternatif bisa diterima tetapi sebuah institusi politik yang menyuarakan isu itu belum tentu bisa diterima. Ini ada sebuah psikologi masyarakat, dimana masyarakat bisa menerima sebuah gagasan jauh lebih mudah ketimbang menerima sebuah kelompok, meskipun gagasan itu lahir dari sebuah kelompok.

Dalam masyarakat kita mungkin jauh lebih menerima gagasan baru dari kelompok yang telah berakar punya tradisi jauh lebih panjang. Ini adalah mau anda sebut konservatisme, kehati-hatian, kultur politik yang sangat kolot atau segala macam, itulah realita politik. Di Aceh ini, karena diberi kesempatan untuk punya partai lokal kesempatan untuk punya entitas politik yang baru itu jauh lebih terbuka. Dan mungkin dari sana akan muncul terobosan-terobosan yang bisa kita bawa ke level nasional.

Rahmad Djailani

Baik, terima kasih Bung Budiman. Secara umum makna pendidikan politik yang disampaikan Budiman dapat kita simpulkan bersama, tapi paling tidak Bung Budiman telah menyampaikan ketika PDI-Perjuangan sedang dihukum oleh rakyat. Bung budiman beserta kawan-kawan mencoba untuk menyelamatkan dan saat ini sedang proses fase pendiskusian itu. Selanjutnya ditengah kita juga telah hadir aktivis Partai Aceh dan juga mantan ketua Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (FDRA) yaitu Bung Kautsar.

Kautsar

Belajar politik masyarakat Aceh dari tabi'at negara bukan dari partai politik. Kenapa? Karena menurut saya, partai politik suatu hal yang baru (pendatang baru) di Aceh. Ketika masyarakat Aceh mengerahkan orang-orang Aceh bertempur di medan area ketika revolusi nasional di Indonesia. Ketika itu kita tidak bicara Partai Politik, tapi kita bicara mengusir penjajah. Dan ketika kita ditipu oleh Indonesia pada tahun 1953 ketika itu di Indonesia sedang emas fase-fasanya liberalisme politik, fase-fase Partai Politik tumbuh dengan sehat dan segar malah kita (Aceh)

disini tidak ber-partai, kita sedang melawan otoriter pemerintah Indonesia di Aceh pada masa itu.

Baru ketika fase zaman Orde Baru kita dipaksa untuk ber-Partai Politik di Aceh. Dan masyarakat Aceh ketika itu berada pada posisi tidak punya pilihan selain harus memilih salah satu 1 dari 3 partai politik yang ada. Pada saat itu orang Aceh memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selain faktor agama dan soal yang lain. Yang perlu di pahami bahwa orang Aceh tidak dikaderkan oleh PPP. Orang Aceh tidak belajar politik dari PPP, tetapi orang Aceh menunjukkan resistensi perlawanannya terhadap pemerintah dengan memilih partai yang berseberangan dengan partai pemilik Orde Baru ketika itu, meskipun PPP bagian daripada sistem politik yang menindas pada masa itu.

Pada tahun 1990 ketika Daerah Operasi Militer berlaku di Aceh, pemerintah memaksa untuk mencoblos No. 2 (Golkar) dan apabila ada desa-desa yang kalah harus bergotong-royong, masyarakat lebih memilih bergotong-royong ketimbang memilih partai pemerintah, kenapa? Resistensi perlawanan terhadap otoritas Jakarta. Ketika reformasi 1998, masyarakat Aceh pada masa itu untuk memilih untuk memboikot Pemilu. Berarti ada yang putus ketika di Jakarta situasi reformasi terbuka, tiba-tiba di Aceh situasinya berlainan. Kita masyarakat Aceh pada tahun 1999 hampir 70 persen tidak memilih dalam Pemilu sebagai pilihan politik. Tahun 2004 juga seperti itu. Artinya yang mau disampaikan saya disini bahwa masyarakat aceh belajar politik dari realitas yang terjadi. Kemudian, ini ada sesuatu ada yang baru di Aceh setelah MoU Helsinki. Dan Gerakan Aceh Merdeka sadar betul sehingga meletakkan posisi partai lokal sebagai salah satu point yang paling penting dalam MoU dan itu hamper terjadi *deadlock* penandatanganan hanya gara-gara Partai Lokal, belum lagi penolakan dari elite politik nasional. Tapi artinya dari sini, Gerakan Aceh Merdeka dengan Partai Aceh itu memberikan

sumbangsih yang besar terhadap wujudnya partai lokal di Aceh dan ini sebuah atmosfir yang baru.

Menurut saya ini tidak perlu kita bangun sebuah dikotomi antara Partai Lokal dan partai nasional, karena kedua-dua berada pada domainnya yang tersendiri. Dan menurut saya tidak ada beda partai politik lokal dan nasional apabila perilaku masih meminjam perilaku partai-partai politik nasional. Kita tidak perlu melihat secara simbolik tapi melihat secara substantif. Bahwa tidak ada perbedaan jika kita masih mengambil tabi'at partai nasional.

Sepatutnya situasi seperti ini tidak perlu dibuat undang-undang, tidak perlu peraturan yang mengatur perbatasan Partai Politik. Tetapi menurut saya akan lebih indah jika beberapa partai yang memiliki kesamaan visi politik yang sama tentang masa depan Aceh ini untuk *integrated*. Lebih baik *integrated* dengan partai-partai yang sudah ada daripada membangun partai-partai yang lain, kenapa? Karena energi yang dikeluarkan untuk membuat partai ini akan tersita, baiknya energi ini kita simpan untuk yang lain daripada hanya terpakai untuk administrative, verifikasi dan lain sebagainya.

Saya juga punya kekhawatiran kalau-kalau kedepan di Aceh situasinya jadi berubah, menjadi pertarungan elit di Aceh. Untuk memperebut pemerintahan di Aceh yang kedepan nominal uang serta otoritas yang dimiliki lebih besar. Kita melupakan pekerjaan rumah kita yaitu hubungan Aceh dengan Jakarta menjadi terlupakan, karena itu belum selesai total dan banyak yang masih kita emban. Artinya, kalau pertarungan tingkat lokal (elit-elit) Aceh kita kembali seperti Jakarta pasca Orba Baru.

Rahmad Djailani

Sangat bagus apa yang sudah disampaikan oleh Bung

Budiman dan Bung Kautsar. Baik sekarang saya akan membacakan beberapa SMS

0813604063xx

“PDI-Perjuangan oposisi atau kalah berkuasa? Oposisi di pusat tapi berkuasa di daerah. Bagaimana konsistensi PDI-Perjuangan dalam membangun kesadaran politik rakyat?”, dari warga Darussalam.

Asnawi Ali di Swedia

“Parlok sudah pernah ditawarkan pada rezim Gus Dur, MoU Helsinki bukan solusi karena UUPA berisi otonomi basi. Partai Nasional juga partai pembohong termasuk juga partainya anak Soekarno”

Rahmad Djailani

Selanjutnya sesi diskusi dibuka untuk peserta yang hadir

Karimun Usman (Ketua DPW-PDI-Perjuangan Aceh)

Pertama saya akan memberikan penjelasan sedikit, diakui atau tidak diakui, bahwa di Aceh pada tahun 1955 sudah pernah ada partai di Aceh. Dan pada 1957 sudah ada Pemilu yang diikuti oleh 64 partai termasuk partai sibal-buali. Dan waktu itu PDI adalah PNI. Jadi yang ingin saya katakan, kalau dibilang tidak partai dulu, adek-adek dan anak-anak yang kita nikmati sekarang sejak tahun 1945 sampai ini hari yang kita diskusikan adalah hasil perjuangan rakyat Aceh di partai nasional pada waktu itu, artinya apa? Untuk kedepan partai nasional akan menjadi mitra bersama partai lokal untuk meningkatkan pembangunan di Aceh. Hasil yang kita nikmati sekarang adalah hasil dari perjuangan orang

Aceh yang ada di partai-partai nasional. Saya mengatakan ini adalah pendidikan politik yang tidak sehat, karena jelas ada 64 partai ikut Pemilihan Umum. Jadi seolah-olah tidak ada partai jadi ini tolong dicatat dan diingat.

Faisal Zakaria (*Koordinator Mahasiswa Peduli Perdamaian Aceh*)

Disini saya Cuma menanggapi bahwa Partai Mahasiswa bukan tidak jadi dan target kita bukan 2009 serta kita juga tidak menargetkan parlemen. Partai mahasiswa adalah partai ekstra parlemen dan disitulah pendidikan politik bagi rakyat karena bukan untuk kekuasaan. Kemudian saya sepakat juga bang kausar bahwa partai local tidak ada bedanya dengan partai nasional. Namun kita melihat sekarang perilaku partai nasional biasanya cenderung tidak memberikan ruang bagi rakyat dimana kebiasaannya membuka kantor partai 1 bulan sebelum dan menutup kantor 1 bulan sesudah pemilu. Dalam konteks pemilu 2009 partai nasional jangan berharap banyak karena rakyat aceh akan banyak memilih partai local.

Rijal (*Partai Rakyat Aceh*)

Pertama saya sepakat bahwa partai adalah tempat kita belajar politik, tapi hari ini saya masih meragukan banyak partai yang punya program tentang bagaimana mencerdaskan banyak rakyat agar rakyat bisa kritis terhadap Negara” makanya hari ini bung budiman anda mengatakan anda bukan Nabi makanya anda berpindah ke PDI-Perjuangan itu hak anda juga. Tapi sangat sayang juga kita punya partai banyak program tapi tidak bisa kita jalankan secara bersama

Dian Rosnidar

Untuk pendidikan politik tidak ada partai politik yang menyediakan fasilitas pendidikan, itu satu. Kedua, saya pikir adalah mata rantai dari kepemimpinan partai politik itu sendiri yang membuat Partai Politik tidak ada pendidikan politiknya. PDI-Perjuangan kalau bukan Soekarno Putri ya Soekarno Putra, begitu juga PKB dari ayah sampai keponakan semua ada disitu, maka tidak ada pendidikan. Dalam konteks Partai lokal juga seperti itu, misalnya kawan-kawan aktivis disitu semua parte (kelompok) bukan partai dan tidak terbuka untuk orang lain itu kembali kepada pendidikan tadi. Saya kira Bung Budiman dan kausar bisa menjawab secara nyata jangan sibuk mengandai-andaikan di luar negeri.

Yusuf Qardhawi (*sekjend Pemerintahan Mahasiswa Serambi Mekkah*)

Pertama, Bung Budiman mengatakan bahwa tujuan utama partai adalah mengartikulasikan cita-cita berbagai kelompok dalam masyarakat. Saya sangat sepakat, hari ini masyarakat menginginkan sesuatu yang masih tertunda, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk mewujudkan artikulasi ini? Untuk kanda Kautsar, kita perlu gambaran lebih tegas tentang apa yang harus Parlok lakukan mengenai pencapaian artikulasi cita-citanya.

Dialog Kuede Kupi tanggal 24 Juni 2008 di Uleekareng di Banda Aceh, dengan pemateri: Budiman Sudjatmiko (Fungsionaris DPP PDI-P dan Ketua RepDem) dan Kautsar (Aktivis Partai Aceh).



KUMPULAN FOTO

...an Publik Di Aceh;
...an Publik Dasar"
(ceh)
...PEJABAT ESELON II PEMERINTAHAN ACEH)

...sajikan dengan baik pusa bersama
...Live di Radio Antara (101.6 FM)









**Quo Vadis
Demokrasi
Lokal di
Gampong**

*Perspektif Sosial Demokrasi
Rasa Kopi Aceh*

Quo Vadis Demokrasi Lokal di Gampong

Struktur pemerintahan desa diseragamkan melalui UU No. 5 Tahun 1979. Masa ‘reformasi’ merupakan titik tolak dari slogan kembali ke desa, yang menekankan pada pembaruan otonomi desa, ditandai oleh desentralisasi kekuasaan dengan terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Dalam konteks ini, pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) dipandang mencerminkan berjalannya prinsip demokrasi desa. Namun tak lama kemudian muncul kecenderungan resentralisasi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang dilatarbelakangi oleh perubahan fungsi Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa, sehingga tidak ada lagi fungsi kontrol terhadap kepala desa. Hal ini mengisyaratkan bahwa desa belum sepenuhnya otonom sebagai suatu entitas yang berdaya secara politik dan ekonomi.

Secara ke-Aceh-an Qanun No. 5 Tahun 2003 juga mengatur tentang peran, fungsi dan kewenangan yang bisa di

ambil di tingkatan Gampong dan Mukim. Persoalan sumber daya ekonomi, dan kebijakan-kebijakan lain yang semuanya demi kesejahteraan gampong harus dilakukan di tingkatan gampong tidak melalui kecamatan.

Demokrasi secara hakiki bermula dari sebuah kelompok yang paling kecil. Dulu gampong mempunyai kewenangan dan martabat yang sangat dijunjung tinggi, manakala undang-undang tahun 1979 diberlakukan mulailah kehancuran di tingkat gampong. Dimana semua harus diseragamkan dan membuat ruang demokrasi menjadi sempit.

Moderator: Saripin (*Aktivis Pemuda Aceh Tengah*)

Diskusi hari ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemikiran-pemikiran (pendidikan politik) tentang persoalan demokrasi yang terjadi di Indonesia umumnya dan Aceh Tengah pada khususnya. Telah hadir dua orang narasumber, yaitu: Irine H. Gayatri (PUSLIT LIPI Jakarta) dan Muhsin (Ketua DPW PRA Aceh Tengah). Kita persilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materi sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab.

Irine H. Gayatri (*PUSLIT LIPI Jakarta*)

Terima kasih yang sedalam-dalamnya dari kawan-kawan SEFA dan kawan-kawan dari Takengon yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ini bukan kunjungan saya yang pertama kemari, karena saya pernah datang kemari untuk melakukan riset kecil tentang pemerintahan gampong di Aceh tengah.

Terima kasih, sebetulnya saya tidak ingin terlalu fokus pada bacaan materi yang telah saya sajikan. Ini adalah supaya hadirin

sekalian bisa memahami dari mana kita ingin berbicara dalam diskusi mengenai topik ini, karena kita bukan seperti duduk di bangku sekolah atau kuliah yang harus membaca materi lalu mengkritisnya. Saya lebih berpendapat bahwa apa yang saya tulis disini adalah sebagai pengantar awal diskusi. Alangkah baiknya saya akan membacakan garis besar dari makalah, nantinya ibu/bapak sekalian bisa langsung memberikan masukan atau pertanyaan tentang paparan saya, apakah benar atau salah yang saya paparkan. Saya mempunyai beberapa inti yang saya buat kedalam empat hal.

Pertama mengenai gampong/kampong/desa, disini semua dari kita sangat memahami atau mengalami bahwa nama gampong bukan hal baru. Kalau di aceh pesisir kita lebih banyak menemui istilah gampong sedangkan di sini (Takengon) kita kenal dengan sebutan kampong. Secara sejarah kenegaraan Indonesia umumnya gampong/kampong kalau di Jawa disebut desa itu memang merupakan wilayah yang asali dimana orang-orang bermukim atau tinggal. Sebelum kita mengenal pemerintahan yang modern dalam arti ada administrasi politik, pelebagaan, pengurus pemerintahan desa. Sebetulnya gampong ada susunan pemerintahan atau susunan pengusaan wilayah yang berdasarkan pada misalnya kekerabatan orang Gayo mengenalnya menjadi sebagai BELAH. Jadi misalnya dulu ada beberapa belah utama diwilayah Gayo (Bebesan, Kebayakan, Pegasing, Bintang, Ceulala dan lain-lain). Itulah yang menjadi dasar bagi persebaran kelompok masyarakat berdasarkan keturunan atau kekerabatan. Di wilayah Aceh pesisir agak beda sedikit, karena mereka mendasarkan kedudukan masyarakat itu berdasarkan wilayah dan di Jawa pun demikian.

Seiring perkembangan kemudian gampong/kampong/desa itu berubah secara perlahan tidak hanya berisikan masyarakat dari satu kekerabatan saja tapi lebih mencerminkan percampuran. Apalagi sudah ada kota, di Takengon sendiri sudah ada kota

dimana masyarakat dari pedesaan bermigrasi ke perkotaan. Seiring modernisasi, masyarakat menjadi modern ekonomi tidak hanya bertani lalu mereka bekerja di kota maka wajah kampung pun menjadi berubah. Kampung tidak hanya menjadi masyarakat yang berdasarkan petani, apakah petani palawija tapi sebagian penduduknya sudah pindah ke kota. Lalu apa kaitannya kampung yang dari susunan masyarakat kekerabatan menjadi modern ekonominya berubah ini apa hubungannya dengan demokrasi. Kita mengenal kalau kembali ke masa lalu di kebutuhan Gayo itu disebut kan oleh Pak Muhsin tentang *sarak opat*. Sebelum kita mengenal DPR, DPD atau LMD. Masyarakat Gayo mengenal apa yang disebut *sarak opat* yang terdiri dari Ketua Adat, Reje, Peutue, Imam Rakyat. Secara filsafati itu mencerminkan bagaimana hubungan sosial masyarakat di tingkatan kampung tersebut, tidak ada masalah yang tidak bisa dibicarakan oleh Sarak opat.

Pengalaman saya tinggal di Kecamatan Permata, saya mengalami bagaimana *Sarak opat* melakukan musyawarah tentang persiapan pembangunan TPA (Tempat Pengajian Anak-anak). Setelah shalat Jum'at para petue ini berkumpul di rumah salah satu petue dan diskusi langsung terjadi yang juga diikuti oleh perwakilan ibu-ibu itu membicarakan mulai dari persoalan siapa yang akan menyumbang dan berapa besar, waktu pelaksanaannya kapan dan kapan akan selesai. Meskipun Negara sudah terbentuk dan ada struktur Badan Pemerintahan Desa (BPD) yang seragam di seluruh Indonesia dan di Takengon disebut Badan Pengawas Kampung (BPK). Tetapi ternyata dalam BPK pun masih ada struktur *Sarak opat* yang berperan. Jadi kekuatan perwakilan yang Informal, disebut yang informal disini karena secara resmi dia tidak termasuk dalam struktur pemerintahan tetapi dia diakui keberadaannya.

Apakah yang disebut demokrasi hanya sebatas itu saja? Persoalannya adalah kalau kita perhatikan kampung itu menjadi dasar bagi pengerukan atau pemberdayaan alam, orang kota



tidak akan makmur tanpa adanya orang kampung yang bekerja di wilayah pertanian kopi atau pertanian lainnya. Atau katakanlah negara tidak akan bertahan tanpa adanya kampung. Tetapi sekarang kita lihat kenapa kota itu makmur, semua uang beredar di kota sedangkan di kampung untuk memasarkan ke kota sangat sulit dimana jembatan rusak dan persoalan lainnya, mengapa itu terjadi?

Dahulu di kampung dahulu ada *Sarak opat* dan lembaga di kampung sekarang makin banyak. Apa yang terjadi di kampung, apakah dia mampu mengaktifkan ekonomi masyarakat di kampung kalau misalnya sesuai dengan cita-cita kesejahteraan itu, pembentukan kelompok-kelompok atau organisasi sosial dan organisasi pemerintah ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat kampung. Lalu dimana peran demokrasi?

Demokrasi kalau yang saya pelajari dulu ada 3 unsur dan secara faktanya memang seperti ini. Ada tempat atau ada rapat untuk rakyat melakukan musyawarah dan mufakat itu dan *sarak opat* sudah memilikinya. Ada hak rakyat mengadakan protes, bagaimana ini cara prakteknya? Barangkali mungkin untuk kebudayaan Gayo bukan melakukan protes tapi dilakukan dalam forum-forum yang dilakukan *sarak opat* atau pemerintahan Kampong. Dan selanjutnya menurut Pak Hatta ada cita-cita tolong menolong. Ini yang paling besar, kalau itu bisa disebut modal sosial walau kota Takengon sudah modern dan pabrik-pabrik usaha International sudah mulai masuk, tetapi di tingkatan masyarakat tolong menolong ini masih besar sekali. Apalagi konflik telah berakhir, antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya sudah mulai terbuka, tidak ada lagi kecurigaan tetapi itu baru terlihat di permukaan.

Disini memang tidak bisa dielakkan perubahan dimasyarakat ini dengan perubahan yang terjadi di luar

masyarakat yang lebih besar. Dimasa Orde baru berkuasa dulu istilah keuchik/imam mukim itu hanya diakui sebatas peraturan daerah. Tetapi secara nasional diwajibkan untuk membuat istilah baru misalnya keuchik/kepala kampung/reje. Reje tidak lagi dikenal, petue masih dikenal tetapi itu ditingkat yang sangat lokal. Mungkin lebih populer kepala desa, sekretaris desa meskipun secara tugas dan tanggung jawab mereka tidak jauh apa yang lebih dahulu sudah dilakukan *Sarak opat*.

Sekarang dimasa reformasi, ada upaya untuk membangkitkan kembali struktur pemerintahan adat ini memberdayakan kembali para geusyk dan perangkat-perangkatnya, termasuk mungkin hak ulayat yang ada supaya gampong ini lebih berdaya secara ekonomi. Tetapi apakah itu terjadi, nanti akan kita diskusikan secara langsung. Apalagi untuk Aceh yang sedang memasuki ruang baru demokrasi dan menjadi tolak ukur dari pemerintahan republik ini dalam menjalani perdamaian dan kita akan melihat ada atau tidak program pemberdayaan terhadap kampung.

Muhsin (Ketua DPW PRA Aceh Tengah)

Selamat datang kepada kawan Irine dan kawan-kawan SEFA sebagai fasilitator dalam diskusi ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkenan hadir untuk mendiskusikan kondisi demokrasi di Aceh Tengah ini.

Mungkin saya hanya sedikit bercerita sejarah demokrasi di Indonesia, sebenarnya negara belajar demokrasi itu dari kampung. Artiannya sebelum Indonesia merdeka kita sudah mempunyai kampung, dimana masyarakat pada saat itu sudah melakukan demokrasi lokal. Dimana perangkat kampung seperti yang disinggung oleh saudari Irine adalah sudah adanya *sarak opat* (Reje, Petue, Imem dan Rakyat). Realita pada zaman-zaman dahulu bahwa tidak ada hukuman, tapi segala persoalan



yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan secara damai atau musyawarah, ini yang menarik dari *sarak opat* tersebut. kemudian pada proses perjalanannya demokrasi kampung ini dituangkan dalam sebuah teori, mungkin kita mengenalnya dengan istilah demokrasi yaitu “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat” ini kan satu contoh yang diambil dari *sarak opat*. Dari segi teori demokrasi memang sangat melindungi rakyat, dimana semua kebijakan, keputusan atau program yang dilakukan di kampung bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh rakyat itu sendiri.

Kemudian inilah yang ditiru oleh pencetus demokrasi, di Aceh sekarang sudah diberlakukan demokrasi lokal. Muncul pertanyaan, bagaimana kita memanfaatkan ruang demokrasi ini? Secara bentuk/wujud *sarak opat* berubah tetapi tidak merubah fungsinya. Perubahan ini berubah oleh Modernitas atau undang-undang otonomi, undang-undang pemerintahan, dimana sekarang lebih dikenal dengan Badan Pengawas Kampung (BPK). Atau tadi Irine menyebutnya Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Persoalannya apakah di Kampung ini berjalan, dimana dalam undang-undang otonomi ini dibalik kewenangan untuk membentuk BPK, Kepala Desa juga mempunyai kewenangan untuk melantik sekretaris, Kaur (Kepala Urusan), KepLor (Kepala Lorong) dan ini ada semacam kesenjangan demokrasi disini.

Pada proses perjalanan demokrasinya lagi, apakah nanti dikatakan demokrasi tapi kita bilang saja demokrasi. Kepala kampung bukan bertanggung jawab kepada masyarakat atau BPK, tapi justru kepada camat. Jadi semua persoalan yang terjadi di kampung kalau camat tidak menyetujui sama dengan nol. Ini mungkin pengalaman yang saya dapatkan ketika bercerita dengan kepala kampung. Inilah kenyataan yang kita rasakan, jadi kampung hanya sebagai tempat administrasi saja umpamanya kalau tidak ada Kartu Keluarga (KK) ya buat KK di kampung sehingga

kita tidak diberikan kewenangan memikirkan secara lebih untuk membuat kebijakan di kampung kita sendiri. Kondisi sekarang kita juga melihat dimana persoalan-persoalan yang terjadi di kampung sudah jarang diselesaikan secara tingkatan kampung, contoh ada kejadian pencurian ayam di kampung ini juga harus ditangani oleh polisi, jadi Reje (Kepala Kampung) sudah tidak mampu melindungi rakyatnya.

Saripin

Mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, silahkan menyebutkan nama dan perwakilannya.

Rijal Efendi (Perwakilan Masyarakat)

Saya menanggapi bahwa mengenai struktur keberadaan gampong/kampung/desa. Disini menjadi permasalahan secara umum, bagaimana wujud demokrasi di kampung itu?

M. Muksin (Desa Payajeget Kecamatan Pegasing)

Demokrasi itu sejak zaman dahulu itu sudah ada. Kenapa sekarang demokrasi itu mulai hilang ditengah-tengah masyarakat? Kenapa saya sampaikan seperti ini karena semua persoalan awal diselesaikan di tingkatan masyarakat namun setelah berada di tingkat pimpinan itu sudah hilang dan tidak bisa dijalankan kebijakan bersama yang sudah di ambil.

Abdul Rauf (Ketua BPK)

Saya menanggapi apa yang disampaikan Bapak Muhsin tadi tentang organisasi kampung. Memang kalau kita kaji dari dahulu sampai sekarang tidak ada perubahan, kenapa tidak ada perubahan. Kalau kita kaji adat istiadat reje, peutue, imem dan rakyat itu masih tetap melakukan musyawarah sebagaimana dahulu.



Ibu Sarimurni (*Perwakilan Perempuan*)

Secara pribadi saya memohon kepada forum ini untuk mendapatkan hasil dari apa yang kita diskusikan. Pertama, mengulang kembali persoalan demokrasi, kita harus mewujudkan demokrasi tentang apa saja. Barangkali disini tidak terjadi demokrasi. Saya melihat di desa sekarang dimana kepala kampung memilih secara pribadi sekretaris kampung, apakah ini yang dikatakan demokrasi?

Jalaluddin (*Kepala Kampung Wih Sagi Indah*)

Masalah *Sarak opat* yang berdomisili di Kampung. Sebenarnya *Sarak opat* ini sangat penting bagi warga, namun sayangnya *Sarak opat* tidak berfungsi. Sebenarnya yang menentukan halal haram, adat istiadat adalah *Sarak opat* di kampung. Jadi selama ini tidak ada kejelasan tentang demokrasi di Aceh tengah ini. Saya sejak menjabat kepala kampung sejak 5 tahun lalu sampai sekarang belum pernah kami ketahui apa yang sebenarnya demokrasi, apa isi dari demokrasi. Sebenarnya BPK adalah mitra kepala kampung dan masyarakat, dimana semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu dilaporkan kepada BPK dan selanjutnya BPK bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Tolong berikan penjelasan yang detail tentang demokrasi kepada kami, karena kami adalah orang yang paling bodoh.

Jufriadi (*LSM PUSPA*)

Menarik memang apa yang dibicarakan tadi dalam beberapa sesi diskusi kita. Saya ingin mencermati dari persoalan yang kita bicarakan. Dalam pengamatan dan pengetahuan saya, sebenarnya demokrasi di tingkat masyarakat lokal atau masyarakat di tingkat pedesaan itu mulai hancur-hancuran dengan diberlakukan undang-undang tahun 1979 yang disamaratakan semua perangkat desa di

Indonesia. Padahal sebelumnya perangkat-perangkat desa punya struktur sendiri. Harus memakai nama kepala desa, ketika hal ini diberlakukan disinilah mulai terjadi kehancuran demokrasi di tingkat masyarakat. Nah, pada tataran hari ini kembali persoalan-persoalan adat dan tata pemerintahan ditatanan masyarakat dicoba benahi. Ketika ini diberlakukan terjadilah kebingungan-kebingungan ditengah masyarakat dan perangkat desa, ditambah lagi dengan begitu banyaknya peraturan-peraturan yang semuanya tidak dipahami atau dipedomankan oleh aparatur di tingkat desa. Padahal persoalan ini menjadi tolak ukur pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa.

Kedua, saya juga melihat persoalan-persoalan menyangkut ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan dimana timbulnya ketergantungan yang sangat besar kepada pemerintah, seolah-olah tanpa bantuan perangkat desa tidak bisa bekerja. Pertanyaan berikutnya sebenarnya *Sarak opat* dan lainnya tidak pernah dibantu pada masa lalu kenapa bisa bekerja dan kenapa hari tidak bisa. Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh kepala desa atau perangkat desa.

Berikutnya, misalnya ada tanah wakaf dan lain-lain kenapa itu tidak pernah dimanfaatkan secara maksimal untuk memberdayakan desa itu sendiri? Kenapa sekarang dipolitikkan semua, sedikit-sedikit proposal. Kemudian ditengah-tengah masyarakat juga lunturnya budaya gotong royong dan rasa kebersamaan. Yang paling hancur lagi ditatanan masyarakat setelah bencana besar gempa dan tsunami semua persoalan sekarang alat ukurnya adalah uang. Contoh ketika ada rapat di kantor camat kepala kampung diundang tapi ketika pada waktu pulang tidak diberikan uang pada rapat selanjutnya kepala kampung sudah malas datang. Ini persoalan yang sangat krusial menurut saya.



Sebenarnya secara sosial (cost social), ini yang paling besar terjadinya pergeseran nilai didalam masyarakat kita. Persoalan yang begitu besar di tingkat kampung, kecamatan, kabupaten bahkan provinsi di Aceh atau Indonesia disini tolak ukur adalah proposal. Ada sesuatu yang menjadikan kita terus ditekan oleh orang lain adalah “JIKA KITA TIDAK MAU MEMBERDAYAKAN DIRI SENDIRI” sebagaimana kata pepatah “JIKA ANDA INGIN MELANGGENGKAN KEKUASAAN ANDA MAKA BODOHKANLAH MASYARAKAT ITU DAN BUATLAH MEREKA KETERGANTUNGAN”.

Ibu Reni (*Perwakilan Masyarakat*)

Demokrasi dan politik tidak akan habis kita bicarakan, kenapa? Karena pelaksanaannya tidak seperti yang kita inginkan oleh masyarakat, dimana peraturan yang dibuat selalu untuk dilanggar dan bukan untuk dijalankan. Kalau peraturan dan demokrasi itu dijalankan sebagaimana mestinya, pasti masyarakat ditanah gayo ini sudah sejahtera. Dalam melaksanakan demokrasi kita harus menempuh jalur birokrasi yang sangat berbelit, mungkin disitu Mbak irine yang harus dijawab?

Saripin

Demikian dialog kita pada hari ini, semoga banyak hal yang kita dapatkan. Wassalam.

Dialog Kuede Kupi tanggal 22 Agustus 2008 di Takengon, Aceh Tengah, dengan pembicara: Irine H. Gayatri (PUSLIT LIPI Jakarta) dan Muhsin (Ketua DPW PRA Aceh Tengah).



**BANJIR DANA
DI ACEH, APA
DAMPAK BAGI
PENGENTASAN
KEMISKINAN?**

*Perspektif Sosial Demokrasi
Rasa Kopi Aceh*

BANJIR DANA DI ACEH, APA DAMPAK BAGI PENGENTASAN KEMISKINAN?

Tsunami dan Perdamaian Aceh telah memasuki usia yang ke-3 tahun. Tangisan dan teriakan untuk mencapai hidup yang lebih layak masih terasakan sampai dengan saat ini. Perhatian pemerintah sangat dibutuhkan dan uluran tangan dari berbagai elemen baik dari dalam maupun luar negeri juga masih sangat-sangat diharapkan.

Dana yang begitu besar hanya bisa dilihat atau itu hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang yang dekat dengan penguasa. Rakyat miskin semakin miskin dan yang kaya terus menumpuk kekayaannya. Apakah kondisi sosial masyarakat ini akan kita biarkan terus menerus yang nantinya akan menimbulkan kondisi sosial yang akan meledak dan tidak bisa dibendung. Percaya atau tidak yakinlah itu akan terjadi.

Empat bulan lagi tahun 2008 akan meninggalkan kita, namun dana APBA masih jauh dari panggang. Ada sebesar



NIAS), beliau lebih akrab disapa Ampon Man. Yang kedua adalah Tgk. Irwansyah Azwar (Ketua Fraksi PKS DPR A). Kawan-kawan sekalian, seperti yang kami sampaikan diawal bahwa ini adalah persoalan yang mendesak yang hari ini terjadi di Aceh. Kita sama-sama memaklumi bahwa perang telah usai tsunami juga sudah berlalu 3 tahun. Akan tetapi banyak orang mengatakan ekonomi Aceh belum bergerak, ekonomi kita masih jalan ditempat padahal uang sangat banyak berputar di Aceh apa masalahnya. Nah sore ini akan kita akan coba diskusikan. Baik tanpa membuang waktu saya langsung saja mempersilahkan pematari kita yang pertama Teuku Kamaruzzaman untuk mencoba menjawab persoalan ini.

Teuku Kamaruzzaman, SH (*Sekretaris BRR NAD-NIAS*)

Kalau kita bilang banjir dana di Aceh dari aspek dana anggaran belanja yang ada dari sejak lama tentu sekarang, itu luar biasa. Baik berdasarkan dari APBD, APBN, Multidonor, NGO, Bilateral dan Multilateral jadi cukup banyak dana. Namun ada juga peristiwa besar yang berskala dunia yaitu tsunami. Eskalasi tsunami kita tahu sejak awal dari konferensi tingkat internasional yang dibuat pada bulan Februari atau Maret di Jakarta, itu perusakan akibat tsunami menurut perkiraan menelan biaya sebesar \$ 7,8 miliar (sekitar 80 Triliun). Kalaupun ada dana yang sekian besar untuk menutupi kerusakan yang sekian besar maka ini kalau kita bilang untuk membangun lebih baik maka memang akan dibutuhkan dana lebih besar lagi.

Dampak dana yang begitu besar kepada Aceh tentu ada, tapi apa ini tersistematis mengentaskan kemiskinan atau hanya orang-orang yang berprofesi tertentu saja yang mendapatkan limpahan dana itu, nah ini diperlukan penelitian yang lebih dalam lagi terhadap ini karena kalau kita bilang mengentaskan kemiskinan maka aspek rakyat miskin lah yang harus disentuh dari semua aspek dana-dana yang beredar di Aceh. Tapi apakah

benar demikian, dengan membangun rumah, jalan, gedung-gedung apakah dengan otomatis bisa mengentaskan kemiskinan. Tapi ada peristiwa besar lain yaitu konflik yang telah berakhir menjadi perdamaian membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih dinamis, membuat beberapa komponen masyarakat atau orang-orang yang dulu menghindari konflik kembali Aceh. Sehingga terjadi penumpukan jumlah tenaga kerja yang sedemikian besar, apakah tenaga kerja ini ada salurannya dari aspek dana yang besar itu juga diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam.

Berbicara dari aspek BRR kita tidak bisa berbicara apakah dana besar itu bisa mengentaskan kemiskinan. Tapi kita tahu beberapa kalangan, profesi tertentu katakanlah rekonstruksi dan lain-lain itu mendapat order/pekerjaan yang begitu besar dari proses rehab rekon dan pembangunan Aceh. Kita tahu tahun ini kalau tidak salah, tapi nanti Tgk.Irwansyah bisa lebih dalam lagi mengulas bagaimana dana APBA yang 8 triliun itu bisa menyentuh sebenarnya aspek-aspek kemiskinan. Karena kita tahu selama ini pembangunan sangat sedikit korelasinya menyentuh aspek kemiskinan. Jadi bagaimanapun inflasi yang tinggi itu ada tolak ukur dari satu proses pembangunan yang memanas. Apakah itu membangun rumah, membeli mobil innova tapi tidak enak juga karena saya pakai mobil innova ini.

Jadi apa itu benar mengentaskan kemiskinan atau hanya kalangan tertentu saja. Tapi menurut saya yang mempunyai peran sangat besar dalam aspek development itu adalah Pemerintah Aceh yaitu Legislatif nya bagaimana merancang aspek-aspek dalam APBA/APBK itu bisa menyentuh akar persoalan kemiskinan didalam masyarakat apakah itu pengangguran, pendapatan, anak yatim dan lain-lain. Saya kira ini mungkin pandangan-pandangan awal yang bisa saya kemukakan.



Rahmad Djailani

Sedikit Ampon (panggilan untuk Teuku Kamaruzzaman), dalam melakukan rehab rekon ini atau salah satu *item* penting dari BRR adalah memberikan bantuan ekonomi. Dalam sebuah artikel saya membaca kalau tidak salah ada 37 koperasi bekerjasama dengan BRR untuk menyalurkan dana bantuan ekonomi tersebut. Nah ada tidaknya sebuah kesimpulan misalnya di BRR dari sekian besar program bantuan ekonomi ini berapa yang sudah berhasil, dan berapa yang tidak? Serta kenapa bisa tidak berhasil? Yang dimanfaatkan oleh orang-orang dalam aspek pengetasan kemiskinan tadi, bagaimana Ampon?

Teuku Kamaruzzaman

Ya terima kasih, koperasi sebenarnya bukan 37 tapi banyak sekali koperasi yang dibantu oleh BRR ada juga LKM-LKM yang diberikan. Misalnya di pasar Aceh ada nyak-nyak pedagang sirih tapi ini aspek bantuannya kecil karena apapun kita mesti, melihat dalam jangka panjang sebab aspek usaha itu tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Tapi saya kira kecil sekali bantuan ekonomi yang diberikan oleh BRR itu kepada sektor-sektor pertumbuhan. Tapi kalau BRR membangun pasar atau sarana terjadinya pertumbuhan katakanlah pedagang-pedagang mempunyai tempat yang reperesentatif untuk mereka menjual hasil-hasilnya itu benar.

Tetapi yang menjadi pertanyaan pokok itu apakah benar itu bisa menyentuh atau mengentaskan kemiskinan dalam skala berapa besar. Kalau berbicara dalam persentase saya tidak punya kompetensi dalam hal ini tentu itu harus kita tanyakan lagi ke Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga-lembaga yang punya kompetensi untuk menilai ini. Tapi saya kira di BRR kita juga memberikan *support* kepada pengentasan kemiskinan, tapi dalam



data mana yang kita gunakan untuk menyatakan bahwa orang Aceh sekian persen miskinnya. Dan satu tahun kemudian berapa persen terjadi penurunan atau bahkan kenaikan angka kemiskinan itu tidak ada data valid sama sekali. Jangankan itu data petani saja dan produksi padi juga tidak ada. Baru-baru ini kita mendorong minimal dianggarkan 50 miliar untuk melakukan pendataan, sebelumnya sudah dianggarkan 9 miliar untuk melakukan pendataan namun ternyata gagal. Kenapa terjadi seperti itu? Karena lembaga yang digunakan tidak *capable* dan kompeten.

Gubernur sendiri tidak percaya pada statistik, padahal apapun ceritanya statistic punya kemampuan ini problemnya dan waktu itu dia (gubernur) tidak percaya dimana legislatif mengatakan statistik yang paling kompeten namun ketika dilakukan oleh lembaga lain hasilnya sangat kacau dan tidak bisa kita terima. Maka, 9 milyar habis percuma data tidak valid malahan ada beberapa daerah tidak disurvei. Saya dengar juga BRR mengucurkan dana 9 miliar untuk kegiatan ini. Baru-baru ini saya mengisi pertemuan BPM seluruh Aceh di Aceh Selatan, mereka juga masih menggunakan data itu yang sudah diproses di kantor polisi. Makanya itu tidak digunakan oleh legislative dalam proses anggaran tahun 2008 dan untuk dana 2009 legislatif Aceh juga tidak setuju memakai data tersebut dan ini menjadi problem bagi rakyat.

Karena bagi saya Data menjadi salah satu problem pembangunan Aceh karena tidak ada data valid angka kemiskinan di Aceh sejak dari tahun 2004 sampai sekarang ditambah lagi tidak ada program yang berkesinambungan dengan program selanjutnya. Akhirnya saya melihat dominasi dari mana asal daerah orang yang mengambil kebijakan itu berperan besar untuk mengalirkan dana. Makanya salah satu faktor lahirnya kaukus barat selatan itu mungkin.

Saya sepakat seperti yang dikatakan Ampon Man, ada sedikit perubahan bahwa kita memiliki sedikit lebih ada uang. Secara sederhana kita melihat di daerah-daerah hampir tidak ada rumah yang tidak ada sepeda motor. Nah kalau kita hanya mengambil rumah atau honda sebagai pedoman sebagai barometer mengukur angka kemiskinan ya itu sudah ada yang dibangun BRR dan pemerintah. Tapi kalau dikatakan itu data berdasarkan penghasilannya itu yang belum ada sama sekali. Karena ternyata banyak juga orang miskin yang belum bisa berobat serta masuk ke perguruan tinggi.

Rahmad Djailani

Begini Bang, menjadi sangat aneh setiap tahun bagi DPRA mengetok palu untuk setiap anggaran namun tidak punya alat ukur apakah anggaran tersebut berhasil atau tidak. Ini kita sebagai rakyat semakin bingung ini, jadi untuk apa anggaran yang disahkan oleh eksekutif dan legislatif?

Tgk. Irwansyah Azwar

Sepakat yang moderator sampaikan, saya aja yang terlibat juga bingung apalagi kalian, misalnya desakan kita untuk membuat data, padahal kami sudah berteriak dari tahun 2004 untuk membuat data. Kemarin ketika pertemuan dengan BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) saya menanyakan tentang kenapa tidak membuat data, jawabannya kalau proyek bukan fisik itu hanya sedikit uang masuknya.

Teuku Kamaruzzaman

Saya sangat terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Tgk. Irwansyah tadi dimana sampai hari ini Pemerintah Aceh belum mempunyai data yang lengkap seberapa besar angka kemiskinan.



Rahmad Djailani

Dari pemaparan pemateri, muncul beberapa pertanyaan melalui sms maupun dari peserta yang hadir

Abu Jihad (Lambaro, 0813607545xxx)

Uang sangat banyak di Aceh tapi hanya orang-orang yang dekat pejabat yang menerima itu semua. Kemudian anggota DPRA memperjuangkan sebagaimana janji masa kampanye dulu, malahan anggota dewan mengambil uang rakyat dengan dalih studi banding dan lain-lain.

Thayeb Loh Angen (*Harian Aceh*)

Mendengar penjelasan kedua pemateri kita saya nilai kedua-duanya masih mengeluh. Kata orang bijak jika anda bukan solusi maka anda-lah masalahnya.

Mahfud (*TAMMI*)

Sudah 3 tahun tsunami tapi kita masih tidak tahu tentang data. Bagaimana kita mau ukur kinerja BRR itu bagus kalau data itu tidak ada, kemudian anehnya kok bisa anggota dewan mengetok palu sedangkan datanya tidak ada? Diskusi kita hari ini kita mengangkat tema banjir dana di Aceh tapi kekhawatiran saya di Aceh nanti akan kebanjiran koruptor dengan kondisi dimana data statistic tingkat kemiskinan di Aceh tidak ada.

Rustam (*South Aceh Institute*)

Seperti kita ketahui apa yang disampaikan oleh pak Irwansyah tadi bahwa dari tahun ke tahun kita sibuk berbicara mengenai data, sedangkan kita lihat lembaga yang berkompeten dimana strukturnya sampai ke kecamatan. Jadi saya mau membandingkan program pemberdayaan masyarakat yang

nampak eksis seperti yang dilakukan oleh NGO lokal, mereka cuma bermodalkan 2 miliar, tapi bisa memberdayakan kelompok nelayan. Jadi untuk apa BPS, kemudian BRR sekarang hanya terlihat pada pembangunan fisik saja tapi kondisi sosial masyarakat hancur.

Sangat menarik apa yang disampaikan Tgk. Irwansyah mengenai tidak ada data yang valid rakyat miskin di Aceh dimana dengan begitu banyak dana, saya selaku masyarakat sangat menyayangkan kadang pengelolaan dana tidak pernah diperuntukkan untuk masyarakat dan tidak pernah tepat sasaran. Sangat kita sayangkan pernyataan seperti ini, dimana pemerintah juga tidak mau menerima data dari BPS. Saya melihat pengelolaan dana yang dilakukan oleh NGO lebih terarah ketimbang yang dilakukan oleh pemerintah? Menurut saya kalau memang pemerintah tidak punya data tentang angka kemiskinan lebih baik kedepan diplotkan melalui PPK (Program Pengembangan Kecamatan)?

Mahdani Amanaf (*LSM Seulawah Relief*)

Setelah saya mendengar penjelasan tadi. Uang memang banyak mengalir di Aceh tapi sayangnya kita hanya bisa melihat saja, jadi sekarang untuk langkah yang lebih efektifnya lagi itu pihak BRR dan DPRA *men-support* masyarakat kecil pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan. Belajar pengalaman mengenai program Peumakmu Nanggroe itu sangat tidak efektif karena tidak dilakukan pendampingan istilahnya tidak ada sebuah team yang turun kelapangan untuk memberikan pelatihan. Kedua, birokrasi pemerintah untuk mengambil uang harus melalui proposal sedangkan masyarakat tidak bisa membuat proposal, masyarakat hanya tahu proposal itu sebagai surat pengantar satu lembar dan selama ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang ahli proposal saja.



Maimun Saleh (*Aliansi Jurnalis Independent*),

Kalau saya melihat tentang uang banyak tapi tidak mensejahterakan rakyat Aceh itu justru menurut saya memang tidak ada pengaruhnya. Kalau kita baca Serambi Indoensia hari ini Aceh posisinya persis sama dengan Papua bagian bawah. Artinya kalau kita mau cek keberadaan BRR mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh menurut saya juga tidak. Dan kemudian tadi dibidang banyak uang dan hanya bisa kita lihat menurut saya juga tidak, hanya sebagian saja yang bisa melihatnya.

Sebenarnya yang perlu Anda tahu bahwa ada begitu banyak saluran yang bisa mensejahterakan rakyat Aceh tapi itu tidak pernah disentuh dan tidak pernah dibuka oleh Pemerintah. Apapun yang dikerjakan oleh pemerintah dan DPRA menurut saya tanpa ada niat yang tulus betul-betul mensejahterakan rakyat aceh itu memang akan mustahil. Kemudian mengenai qanun wali nanggroe, berapa duit yang harus dikeluarkan, pernahkan mereka menghitung misalnya kalau yang berangkat saja 10 orang itu masih sangat besar, tapi mereka pasti tahu itu.

Hal lain lagi misalnya tiket 3 orang saja masih bisa membayar kepala pustaka Belanda untuk datang kemari memaparkan konsepnya. Tidak perlu mengeluarkan uang dari negara, atau misalnya bilang sama Ampon Man suruh Wali (Hasan Tiro) pulang sebentar menjenguk rakyat Aceh. Artinya tidak perlu mengirimkan 20-an orang untuk berangkat, malu nanti wali nanggroe masa untuk pulang ke Aceh aja tidak punya uang. Jadi maksud saya, apapun ceritanya kita harus rasional tapi kalau bicara data saya setuju karena proses yang dilakukan UNDP bekerjasama dengan BPS nah itu juga hancur-hancuran. Bahwa validitas dari sebuah data itu sangat tergantung dari sebuah kondisi, misalnya mau Pemilu maka angka rakyat miskin banyak tapi kalau mau bagi-bagi uang jumlah orang miskin akan berkurang. Jadi data

orang miskin di Aceh naik turun dari kepentingan orang yang berkuasa.

Syamsul Raden (SPKA)

Saya selaku warga Negara RI yang tercinta ini, pemerintah punya DPR, BRR dan lain sebagainya tapi saya heran mengapa data ini tidak ada. Untuk BPS, bubarkan saja lembaga tersebut kalau tidak mampu membuat data yang valid. Tadi Ampon Man mengatakan kepada kita bahwa ekonomi sedikit tumbuh kemudian Inflasi tinggi dan APBA terlambat menurut Tgk. Irwansyah, koruptor merajalela nah ini merupakan penyebab kemiskinan. Jadi menurut saya yang menciptakan kemiskinan hari ini adalah DPRA karena mereka yang mengetuk palu untuk mensahkan sebuah anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah.

Rahmad Djailani

Semoga banyak manfaat yang kita dapatkan dari dialog hari ini, mari kita beri *applause* untuk kita semua, terimakasih.



**Partai Politik
Lokal Dalam
Pusaran
Konsolidasi
Demokrasi**

*Perspektif Sosial Demokrasi
Rasa Kopi Aceh*

Partai Politik Lokal Dalam Pusaran Konsolidasi Demokrasi

Kemenangan mutlak Partai Aceh sebagai salah satu partai politik lokal dari 6 partai politik lokal kontestan pemilu 2009 telah meraih 33 kursi dari 69 kursi di DPRA. Disusul oleh partai nasional yaitu Partai Demokrat yang memperoleh 10 kursi dan partai Golkar dengan 7 kursi. Sedangkan partai politik lokal lainnya malah kalah dengan peroleh partai tengah seperti PAN, PKS dan PPP. Dari peroleh pemungutan suara hanya Partai Daulat Aceh yang memperoleh 1 kursi.

Melihat realitas politik tersebut, kekuatan partai nasional secara keseluruhan masih kuat dibandingkan dengan partai politik lokal, walaupun secara dominan Partai Aceh akan menguasai fraksi dan komisi di DPRA. Peran partai politik lokal sebagai kanal yang memperjuangkan aspirasi lokal dan rekrutmen elite lokal Aceh baru hanya Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh. Mobilitas vertikal elit-elit Aceh Baru hanya dari pentolan-pentolan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan sebagian kecil kaum santri/

thaliban, sedangkan kalangan sipil demokratik belum mendapat tempat di ujung pena para pemilih.

Kalangan sipil demokratik masih kalah dengan calon-calon yang sudah lama menjadi elit pemerintahan dan politik di Aceh yang disokong partai politik nasional. Proses kemenangan dan kekalahan ini juga harus dimaknai secara positif, tidak secara emosional yang berlebihan. Sejak penandatanganan MoU Helsinki, Aceh mengalami proses transisi demokrasi. Pasca pemilu 2009 ini, Aceh ke depan butuh konsolidasi demokrasi. Proses yang sedang berlangsung adalah proses penguatan demokrasi prosedural, bukan demokrasi yang memberdayakan kedaulatan rakyat.

Proses transisi yang menjadi indikator “demokrasi” adalah keberhasilan penyelenggaraan pilkadasung (pemilihan kepala daerah langsung) 11 Desember 2006, pembentukan partai politik lokal dan Pemilu 2009. Sementara itu “kedaulatan rakyat” baru sebatas angka partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara dan pawai kampanye. Disisi lain manakala keterbukaan politik serta mekanisme demokrasi elektoral berusaha dicapai, ternyata elit politik lama lebih sigap memanfaatkannya ketimbang sipil demokratik.

Syaiful Bahari (*PPR-Ketua Umum Partai Perserikatan Rakyat*)

Kehadiran partai lokal di Aceh secara tidak langsung menandai perubahan anatomi sistem kepartaian di Indonesia. Keberadaan Partai Lokal sebenarnya sudah lama dikenal dimasa demokrasi parlementer pada tahun 1950-an seperti Partai Dayak di Kalimantan. Hanya saja sejak Orde Baru berkuasa dan jumlah partai dipangkas menjadi tiga partai (Golkar, PDI, dan PPP), lalu referensi tentang partai lokal dari sistem kepartaian Indonesia yang kemudian lebih didominasi oleh wacana partai nasional.

Sampai saat ini, walaupun Partai Lokal telah mendapatkan status legalnya dari pemerintah, namun posisinya sebagai partai yang mempunyai hak untuk berpolitik secara demokratis dan adil belum memperoleh kepastian. Masih ada keengganan atau kekhawatiran dari partai-partai nasional melalui fraksinya di DPR/DPRD untuk tidak memberikan ruang gerak yang lebih luas pada partai lokal untuk memasuki arena politik Pemilu.

Representasi Politik

Partai lokal di Aceh sebenarnya menjadi gambaran mikro bagaimana ketegangan relasi yang telah lama terpendam antara representasi politik local dengan politik nasional. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat local yang mempertanyakan kembali seberapa besarnya komitmen partai-partai nasional mampu memperjuangkan aspirasi dan tuntutan masyarakat di tingkat lokal telah menjadi sumber kekecewaan yang semakin meluas. Kesenjangan dan ketegangan relasi antara aspirasi masyarakat local dengan partai-partai nasional tidak hanya terjadi di Aceh, tapi hampir di semua daerah merasakan hal yang sama, walaupun dalam derajat yang berbeda-beda.

Persoalan ini muncul setidaknya dikarenakan oleh dua hal. *Pertama*, adanya masalah representasi politik nasional yang tidak berakar di lokal. Hampir sebagian besar wakil-wakil legislatif di pusat yang dipilih melalui partai-partai nasional tidak memiliki hubungan yang kuat dan mengikat dengan pemilih-pemilih mereka di daerah. Banyak kasus para kandidat tidak pernah tinggal atau bukan warga negara dari daerah setempat. Dengan demikian mereka tidak memiliki hubungan emosional dengan para masyarakat pemilihnya, sebaliknya masyarakat juga tidak mengenal siapa wakil mereka yang duduk di DPR. Longgarnya relasi dan ikatan tersebut membuat anggota-anggota legislatif tidak perlu merasa bertanggungjawabkan mandate politiknya kepada masyarakat.

Kedua, masalah system kepartaian yang sentralistik. Sudah sejak Orde Baru sampai pasca reformasi umumnya bentuk dan system kepartaian di Indonesia cenderung terpusat di nasional. Keputusan-keputusan politik sampai kepada penentuan kandidat legislatif dan eksekutif lebih banyak ditentukan pengurus pusat, bahkan lebih jauh oleh ketua partai sebagai figur sentral. Ketidakmampuan partai nasional menjalankan system demokrasi internal didalam partai telah menciptakan konflik-konflik antara pengurus pusat dan daerah. Hal ini yang menyebabkan banyaknya perpecahan didalam tubuh partai dan melahirkan partai-partai tandingan.

Sistem kepartaian nasional yang sentralistik dan berakar selama empat puluh tahun lebih ini menjadi sumber elitism politik dan tradisi paternalism dalam politik di Indonesia. Cabang-cabang dan pengurus partai daerah memiliki ketergantungan yang sangat kuat dengan pimpinan nasionalnya di Jakarta. Ketergantungan ini seringkali melemahkan kemandirian partai di daerah-daerah baik secara pendanaan maupun posisi tawar politik. Sementara itu undang-undang kepartaian dan Pemilu yang telah disetujui DPR justru memperkuat karakter sentralisme politik ditangan partai-partai nasional. Dalam realitas yang lain proses demokratisasi lokal melalui otonomi daerah dan terbukanya peluang calon independen dalam Pilkada semakin cepat berjalan, sedangkan sistem dan bentuk kepartaian masih bersifat konservatif.

Partai Alternatif?

Bisakah Partai Lokal menjadi alternatif politik lokal? Memang tidak otomatis Partai Lokal bisa menjadi lebih baik dari partai nasional atau menjadi harapan masyarakat lokal. Partai lokal juga bisa terjebak penyakit sebagaimana yang diidap oleh partai nasional, seperti sifat paternalistic dan



menguatnya elitisme lokal yang bersandar pada tokoh-tokoh lokal, serta praktik politik uang. Namun secara geografi politik Partai Lokal memiliki kesempatan yang besar untuk dapat secara emosional bersentuhan langsung dengan konstituennya di level *grassroad*.

Karena itu yang penting untuk diupayakan adalah bagaimana dapat membangun Partai Lokal yang modern dan berakar di masyarakat. Partai Lokal di Aceh perlu dijadikan contoh yang baik agar kehadirannya bisa mengubah perspektif sistem kepartaian di Indonesia. Dengan demikian pemikiran tunggal bahwa Partai Politik haruslah partai nasional sudah harus ditinggalkan.

Dialog Kuede Kupi tanggal 1 Agustus 2009 di Kuala Simpang, dengan pembicara: Syaiful Bahari (PPR-Ketua Umum Partai Perserikatan Rakyat)



**Prospek
Demokrasi
Sosial Di
Tengah
Menguatnya
Demokrasi
Lokal Di Aceh**

*Perspektif Sosial Demokrasi
Rasa Kopi Aceh*

Prospek Demokrasi Sosial Di Tengah Menguatnya Demokrasi Lokal Di Aceh

Tidak dapat dipungkiri, demokrasi merupakan satu-satunya pilihan system politik yang paling bisa menjamin hak-hak politik warga negara, serta menjamin keberlangsungan sirkulasi kepemimpinan politik disuatu negara diatas kebebasan dan jaminan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama didalam politik. Namun, demokrasi bukanlah satu-satunya jalan mencapai kemaslahatan manusia, baik keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Beberapa negara yang menjalankan demokrasi namun kurang berhasil membangun kesejahteraan dan keadilan ekonomi, bahkan tidak jarang ditengah jalan gagal melanggengkan system demokrasi yang telah mereka pelihara beberapa periode. Kasus Thailand adalah salah satu contoh dimana system demokrasi yang tidak dilengkapi berbagai keperluan sistem pendukung lainnya, mengalami interupsi lewat kudeta militer beberapa kali, termasuk yang baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu.

Samuel P. Huntington mencoba membandingkan antara demokrasi dan kediktatoran dan menyimpulkan bahwa paling tidak ada tiga perbedaan yang amat penting diantara keduanya. Pertama, demokrasi politik berkaitan erat dengan kebebasan individu. Meski di negara demokrasi masih juga terdapat pelanggaran atas hak-hak dan kebebasan individu, tetapi rezim otoriter jauh lebih besar melakukan pelanggaran. Dalam artian bahwa korelasi antara eksistensi demokrasi dengan eksistensi kebebasan individu adalah sangat tinggi. Kedua, stabilitas pemerintah dan pendekatan pemerintah terhadap setiap masalah. Di negara demokrasi pendekatan kekerasan jarang digunakan, sebaliknya di negara diktator.

Meski stabilitas politik tidak serta merta bisa diraih, namun kelangsungan pemerintahan yang sungguh menjalankan demokrasi lebih diyakini kelanggengannya. Ketiga, negara-negara demokrasi secara umum paling sedikit melakukan peperangan terhadap negara demokratis lainnya. Dengan demikian, penyebaran gagasan demokrasi berarti sekaligus perluasan zona perdamaian ditingkat global.

Bila demokrasi dalam pandangan klasik diartikan sebagai kehendak rakyat (*the will of people*) dan kebaikan bersama untuk mencapai tujuan, namun Joseph Schumpeter merumuskan teori lain tentang demokrasi. Metoda demokratis menurutnya adalah prosedur kelembagaan untuk mnecapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Teori inilah yang lebih banyak mempengaruhi praktek demokrasi di dunia saat ini, sehingga seringkali disebut sebagai demokrasi procedural atau demokrasi elektoral.



Robert Dahl menyebutkan definisi minimal dari demokrasi, yakni pertama harus tersedianya ruang persaingan terbuka untuk mendapatkan semua kedudukan dan kekuasaan politik serta kedua tersedianya ruang partisipasi politik bagi semua warga negara. Lebih lanjut, Dahl menyampaikan delapan prasyarat bagi terbentuknya system politik yang demokratis, yakni:

1. Kebebasan berasosiasi dan berkoalisi
2. Hak untuk mengemukakan pendapat secara bebas
3. Hak untuk memilih (hak pilih aktif)
4. Hak pilih untuk dipilih (hak pilih pasif)
5. Hak untuk bersaing mendapatkan dukungan politik dari pemilih
6. Adanya kebebasan informasi, termasuk keragaman sumber informasi
7. Pemilihan yang bebas dan adil
8. Keberadaan institusi yang memungkinkan kebijakan pemerintahan tergantung kepada suara pemilih dan tuntutan preferensi publik

Jadi selain jaminan mengenai kebebasan individu, demokrasi merupakan sistem atau prosedur untuk mengatur sirkulasi kepemimpinan serta prosedur untuk mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan bersama, namun *universal suffrage* yang meliputi hak pilih aktif maupun pasif melalui Pemilu yang bebas dan adil, hanya seringkali tereduksi sekadar menjadi demonstrasi delegatif atau demokrasi elit.

Warga negara tak mendapatkan hak-hak lainnya, kecuali hak kebebasan, sementara mekanisme pasar ekonomi tetap berkolaborasi dengan golongan elit yang menguasai sistem politik. Beberapa negara dunia ketiga dimana rakyat merasa bosan dengan praktek demokrasi yang tidak juga mendatangkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua rakyat, mulai kehilangan

kepercayaan terhadap demokrasi dan mendukung munculnya kembali rezim otoriter yang datang dengan janji perbaikan taraf hidup dan pilihan pragmatis lain yang diabaikan demokrasi procedural seperti ini.

Ahmad Taufan Damanik

Thomas Meyer percaya bahwa ide dasar demokrasi seharusnya didasarkan kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang kemudian diteruskan kedalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Bagi Meyer, demokrasi tidak bisa hanya didasarkan kepada pemenuhan hak sipil dan politik, tetapi harus sekaligus menjawab ketiga hak-hak dasar lainnya yakni hak sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan begitu, demokrasi disemua aspek kehidupan negara dan masyarakat.

Dalam hal ini negara harus menjamin perlindungan social berupa kesempatan pendidikan dan keterampilan yang sama, keadilan ekonomi maupun keikutsertaan setiap warga negara didalam segala sektor kehidupan yang luas. Karenanya, pasar ekonomi kapitalis harus diatur, selain pengaturan atas ruang publik. Konsep mengenai *distributive justice* menjadi penting dalam konteks demokrasi sosial, dimana pertumbuhan ekonomi semata, sebagaimana kaum liberal meletakkan seluruh harapan tentang kesejahteraan warga negara kepada mekanisme pasar bebas (tidak serta merta menjamin keadilan sosial serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar sosial, ekonomi, dan budaya). Kemestian mencapai keadilan sosial menyebabkan kalangan demokrasi sosial tidak sepenuhnya meyakini konsep pasar bebas, dengan demikian peran negara tetap diperlukan untuk menjamin keadilan, baik keadilan didalam mengakses sumber-sumber ekonomi dan kekayaan alam maupun akses terhadap pasar.



Ide tentang keadilan sosial, sebagaimana dirumuskan kaum liberal semisal John Rawls, yang hampir sepenuhnya mengandalkan kepada institusi negara tidak sepenuhnya menjawab dimensi-dimensi keadilan tanpa menciptakan demokrasi disemua sektor, baik negara, pasar maupun masyarakat itu sendiri. Demokrasi sosial, dengan begitu mengasumsikan bahwa ketiga ranah yang berbeda, yakni ranah negara, pasar, dan ranah masyarakat semuanya perlu diperkuat sekaligus. Untuk itu, tentu saja diperlukan institusi-institusi yang menjamin berlangsungnya demokrasi disemuaranah tadi tanpa mesti bergantung kepada pemimpin-pemimpin politik yang berhati baik semata. Institusi-institusi itu dapat dibangun melalui konstitusi yang disusun pelaksana negara maupun yang senantiasa dilembagakan didalam ranah masyarakat, dalam arti berjalan dinamis di tengah-tengah kehidupan sehari-hari masyarakat dan menjadi nilai sosial.

Meyer kembali menegaskan bahwa demokrasi pada dasarnya memiliki tiga yang berbeda untuk mencapai tujuan publik (yakni keadilan sosial atau pemenuhan hak-hak dasar dalam bentuk barang dan jasa), baik melalui pasar, negara atau yang difasilitasi oleh masyarakat dengan prinsip solidaritas. Ketiga pendekatan yang berbeda dapat dilakukan secara bergantian dan seimbang, bergantung kepada pengalaman suatu masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara aktif tentu sangat dibutuhkan dalam pengembangan demokrasi sosial, tidak saja didalam bidang politik, tetapi juga didalam ekonomi, dan sosial-budaya. Hanya saja keterlibatan aktif mereka harus dijamin oleh kebijakan negara dalam bentuk perundang-undangan sekaligus disosialisasikan terus-menerus sehingga menjadi nilai sosial bersama.

Partisipasi masyarakat didalam angkatan kerja misalnya, mestilah didukung oleh adanya jaminan perlindungan mengenai hak-hak pekerja, maupun jaminan dari sub system yang lain, misalnya jaminan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan. Namun, diluar itu kesadaran mengenai hak-hak

pekerja perlu menjadi nilai dan sikap sosial masyarakat. Dengan demikian, interaksi antara buruh dan pengusaha akan dijaga didalam koridor perundang-undangan yang berlaku adil, karena berada di bawah kekuasaan negara. Tetapi, interaksi yang adil diantara keduanya (buruh dan pengusaha) sekaligus tidak bisa dipisahkan dari praktek nilai sosial yang memang sudah mengakar di masyarakat, bukan juga pengusaha.

Demikian pula halnya dengan hak-hak partisipasi politik, dalam pengembangannya membutuhkan suatu ranah politik diskursus publik yang terbuka. Jaminan terhadap pers yang bebas dan merdeka serta akses yang sama terhadap sumber informasi menjadi bagian yang tak terpisahkan. Habernas menjelaskan gagasan ini dengan lebih jelas dengan mengusulkan gagasan komunikasi emansipatif, dimana bukan saja sumber-sumber informasi harus dibuka seluas mungkin, tetapi *message* atau diskursus yang dikembangkanpun mesti dibuka sedemikian rupa dari kemungkinan terjadinya eksklusifisme. Dengan demikian, kesepakatan-kesepakatan politik maupun sosial yang dilahirkan dari proses komunikasi emansipatif ini akan melahirkan suatu tatanan masyarakat dan negara yang lebih egaliter.

Namun sebagian dijelaskan oleh Meyer diawal, demokrasi sosial pada tingkat kemajuan seperti ini, tidak bisa tidak harus dimulai dari adanya jaminan atas hak-hak dasar yang meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Negara dan masyarakat sipil memainkan peran yang besar untuk memastikan semua dimensi hak tersebut dapat terselenggara. Dalam konteks ini, kemaslahatan orang banyak berarti tidak sepenuhnya diberikan kepada negara (apalagi pasar), tetapi dalam banyak sektor justru bergantung begitu besar kepada masyarakat sipil. Dalam praktek politik, seringkali para pakar politik memisahkan ranah masyarakat sipil yang dikuasai oleh NGO, organisasi profesi, asosiasi, institusi sosial-keagamaan, organisasi

masyarakat dan lain-lain. Seringkali di negara-negara gelombang ketiga demokrasi, seperti Indonesia, ranah masyarakat sipil justru diletakkan dibawah pengaturan dan kontribusi yang besar dari negara.

Relevansi Untuk Dinamika Demokratisasi di Aceh

Pasca ditandatanganinya MoU perdamaian GAM-RI, agenda besar yang mesti dirumuskan adalah bagaimana mentransformasikan sebuah ideologi Aceh Merdeka kepada Aceh Baru, yang tidak saja harus dirumuskan didalam tataran konseptual-ideologis, tapi juga ke tingkat pratikal. Tentu saja ide substantif tentang “kemerdekaan” tidak bisa dihilangkan begitu saja, sebab ide ini diluar tuntunan politik memisahkan diri, menyangkut hakikat dasar hak-hak politik baik individu maupun masyarakat Aceh secara menyeluruh. Makna merdeka, meski sekarang berada dalam bungkus Indonesia, harus dijabarkan didalam praktek demokrasi di Aceh.

Jika demokrasi sosial sebagaimana dibayangkan Thomas Meyer yakni demokrasi yang berdasarkan hak-hak dasar, sipil, politik, ekonomi, dan budaya yang ingin dipraktekkan di Aceh, maka pertanyaannya harus dimulai dari seberapa jauh demokratisasi di Indonesia juga bisa mengadopsi pemikiran-pemikiran demokrasi sosial. Artinya, praktek demokrasi di Aceh, meskipun otonomi memberikan ruang tertentu yang dapat dimanfaatkan, tetapi tidaklah mungkin sepenuhnya menyimpang dari apa yang dipraktekkan di Indonesia. Sebagai contoh, bila demokrasi sosial membutuhkan prasyarat dasar berupa pengakuan kelima hak tadi, dibutuhkan ratifikasi atas kedua Konvenan Internasional oleh Jakarta. Salah satu butir MoU memang mengamanatkan diberlakukannya kedua instrument hukum internasional tadi sebagai kerangka dasar membangun politik, sosial, dan ekonomi

Aceh. Tetapi, ratifikasi dan harmonisasi konstitusi hanya mungkin dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Jakarta.

Dengan begitu, proses pembangunan demokrasi sosial di Aceh harus sekaligus dilakukan dalam rangka membangun demokrasi sosial di Indonesia. Tanpa pengakuan atas kelima hak-hak dasar tadi, praktek demokrasi di Indonesia memang belum menjamin sepenuhnya keadilan sosial. Konsep *distributive justice* telah lama diutarakan oleh tokoh seperti Muhammad Hatta, namun perlindungan dan *social security* untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan), kebutuhan ekonomi dasar (semisal jaminan atas pekerjaan, gaji yang cukup), maupun hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya lainnya, belum terlembagakan didalam sistem politik dan ekonomi Indonesia. Gejala yang muncul sejak Orde Baru justru semakin meletakkan pencapaian semua hak-hak dasar tadi di ranah pasar. Negara justru gagal menunjukkan perannya mendistribusikan keadilan sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, agak mustahil memulai demokrasi sosial dan peran negara.

Sebaliknya ada potensi historis yang dimiliki Aceh, yakni kekuatan perlawanan yang kemudian jika dapat ditransformasikan menjadi kekuatan masyarakat sipil akan membawa pengaruh besar bagi pembangunan demokrasi sosial, bukan saja di Aceh tetapi di Indonesia paling tidak, dengan otonomi terbatas yang dimiliki saat ini menjadi mungkin untuk dijadikan arena eksperimen bagi demokrasi sosial. Masalahnya adalah bagaimana menyusun langkah-langkah strategis yang bisa membangun dan memperkuat tiga ranah sekaligus, yakni ranah pasar, ranah negara, ranah masyarakat.

Untuk itulah potensi-potensi historis perlawanan yang ada selama ini, diharapkan mampu membagi peran di ketiga ranah yang sama pentingnya untuk diperkuat. Perjuangan berikutnya



adalah bagaimana melembagakan peran efektif dari ketiga ranah untuk mencapai cita-cita keadilan sosial di Aceh. Berbagai qanun yang sebentar lagi akan dikeluarkan merupakan titik tolak penting selain eksperimen demokrasi politik berupa Pilkada yang juga sebentar lagi dilakukan.

Agung Wijaya (*Koordinator kantor Aceh-Perkumpulan Demos*)

Salah satu arti penting dari proses demokratisasi Aceh pasca undang-undang Pemerintahan Aceh adalah bergesernya pendulum politik, dari politik sentral ke politik lokal. Sentralisme kekuasaan yang selama tiga dasawarsa berpusat di Jakarta pudar oleh kebijakan desentralisasi. Politik lokal bukan lagi sesuatu yang dianggap tabu seiring dengan desentralisasi distribusi kekuasaan politik yang terbuka dan tercipta ruang-ruang politik lokal baru di Aceh.

Secara legal ruang-ruang politik lokal baru semakin dimungkinkan dengan dijaminnya pembentukan partai politik lokal. Bukan hanya ada, tetapi juga dapat terlibat peserta Pemilu di tingkat lokal dan nasional (bab XI pasal 75 tentang pembentukan partai politik lokal dalam undang-undang Pemerintahan Aceh). Peluang ini sesungguhnya merupakan tantangan besar bagi komponen pro-demokrasi dikalangan masyarakat sipil Aceh di tengah-tengah kuatnya pengaruh para pembajak demokrasi terhadap proses demokratisasi yang sedang berlangsung sekarang ini.

Dengan kekuatan yang ada, mereka cenderung menguasai arena percaturan politik lokal tanpa berkepentingan untuk memajukannya. Akibatnya tanpa keterlibatan riil dari komponen pro-demokrasi dalam memanfaatkan institusi demokrasi yang ada niscaya institusi demokrasi hanya akan menguntungkan kaum oligarki di Aceh.

Kesepakatan damai yang dibangun di Helsinki mengharapkan bahwa pertikaian akan mereda dan dapat diubah menjadi kegiatan pembangunan bersama (melalui proses pemberian kompensasi, integrasi, dan proses rekonstruksi terpadu). Seiring dengan proses damai itu, menggejala pula korupsi, preferensi terhadap sekelompok pihak, dominasi kelompok bisnis tertentu dan kurangnya akses masyarakat terhadap kebijakan publik, masih tetap ada di masyarakat. Dengan demikian, akan menjadi sangat sulit untuk melakukan transformasi konflik ke arah sistem demokratis yang berarti.

Kondisi dari elemen-elemen dasar seperti kesetaraan warga negara, hak asasi manusia, aturan hukum dan terlebih lagi keterwakilan politik justru sangat memprihatinkan. Kondisi ini jika terus berlangsung dan tak tertanggulangi akan menjadi pijakan munculnya ketidakpuasan yang berujung pada kekerasan. Hak-hak demokratis beserta dengan institusinya dimonopoli oleh para pembajak, maka dapat dipastikan Aceh akan mengalami defisit demokrasi. Kaum pro-demokrasi terpinggirkan oleh elit yang sudah lama bercokol melakukan kolonisasi demokrasi. Kondisi ini diperparah oleh menguatnya politik identitas, korupsi massif uang melanda hampir semua sektor publik, kriminalitas yang makin meruyak karena problem kemiskinan, dan reintegrasi yang tak kunjung selesai.

Dengan keadaan Aceh demikian, Aceh tidak dapat berharap akan terjadi perubahan yang mendasar setelah pemilihan langsung kepala-kepala daerah seperti gubernur dan bupati yang akan segera dilaksanakan di Aceh. Data kami menunjukkan bahwa kecenderungan utama yang akan muncul dalam pemilihan lansung tersebut adalah politik uang dan persaingan antar aliansi yang didasarkan pada charisma perseorangan yang biasanya berasal dari polistisi dominan, birokrat, pengusaha dan pada tingkat tertentu, pemuka agama. Oleh karena itu,



aktifitas pembangunan maupun kegiatan politik demokratis harus terus diawasi dan ditingkatkan serta diperbaiki agar dapat berhasil dengan baik. Dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk dapat secara bersama-sama mempelajari, mengawasi, mengorganisasikan, menghubungkan ke lini atas dan juga melakukan pengorganisasian politik dari akar rumput! Dan secara bertahap memperbaiki kualitas yang rendah dari agenda aksi serta kurangnya hubungan yang terorganisasi dengan proses politik didalam agenda memanfaatkan ruang-ruang politik baru di tingkat lokal, seperti Partai Lokal.

Perdebatan Politis - Akademis

Ada berbagai pandangan populer yang kiranya penting dipertimbangkan dalam pembahasan tentang gagasan partai politik lokal di Indonesia pasca Orde Baru. Pertama, sebagaimana sering dikhawatirkan kalangan elit politik Jakarta, gagasan ini dianggap potensial menyebabkan munculnya separatism yang akan berujung pada pecahnya NKRI. Kedua, masih mirip dengan argumen seperti itu, partai politik lokal juga dikhawatirkan melahirkan bentuk-bentuk solidaritas politik berbasis lokalisme-komunalisme, promordialisme yakni etnis atau agama, dan jenis-jenis sentimen *non-citizenship* lainnya. Pandangan ketiga yang lebih optimis melihat bahwa partai politik lokal justru menyediakan jalan keluar dari kebuntuan politik kepartaian saat ini yang masih sangat sentralistik, elitis, dan bahkan oligarkis.

Diluar berbagai pandangan populer itu, sesungguhnya masih terdapat perdebatan politis dan akademis yang jauh lebih kompleks mengenai kemungkinan munculnya Partai Lokal dalam sistem politik Indonesia. Konteks perdebatan itu berkisar pada pertanyaan tentang Partai Lokal seperti apa yang sesungguhnya benar-benar dibutuhkan untuk pendalaman demokrasi (*democratic deepening*) dewasa ini. Apa sesungguhnya substansi dan signifikansi

dibalik kebutuhan akan adanya Partai Lokal di Indonesia? Apakah ketentuan tentang Partai Lokal harus diberlakukan secara nasional, atau hanya terbatas di wilayah-wilayah tertentu? Bagaimana batasan geografisnya? Bagaimana hubungannya dengan partai-partai nasional?

Sementara kesepakatan-kesepakatan demokratis masih belum dicapai pada aspek-aspek tersebut. Dewasa ini sungguh amat strategis untuk mengklarifikasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan partai politik lokal dalam hubungannya dengan isu-isu demokratisasi. Dalam konteks ini, pertanyaan-pertanyaan yang penting diajukan adalah menyangkut bagaimana kita melihat hubungan antara Partai Politik dan gerakan sosial. Dengan kata lain, jika gagasan tentang partai lokal dipandang sebagai alternative bagi asosiasi-asosiasi poliyik non-partai ditingkat lokal yang sejauh ini sedang berusaha masuk kedalam proses politik electoral, apa syarat-syarat yang diperlukan agar partai lokal bisa secara optimal berfungsi untuk memperkuay representasi politik lokal?

Kritisisme (bukan pesimisme atau sinisme) terhadap Partai Lokal tampaknya tetap diperlukan di tengah-tengah imajinasi sebagian aktivis sosial terhadap maraknya wacana Parlok sekarang ini, sebagai momentum yang baik untuk politisasi gerakan. Kritisisme seperti itu penting, karena dulu kita juga pernah sangat ilusif membayangkan munculnya sistem multipartai yang ternyata kemudian berubah menjadi wadah kekuasaan oligarkis kalangan elit nasional. Apakah partai lokal dijamin tidak akan kembali dicaplok oleh mereka?

Partai Lokal: Political Breakthrough?

Melihat persoalan-persoalan yang ada, perlu kiranya untuk mulai memberikan perhatian pada usaha mendorong dimensi-dimensi mendasar keterwakilan politik lokal, lebih dari



sekadar Pemilu dan kebebasan untuk membentuk partai. Perlu diingat, dalam bentuknya yang sekarang ini, partai-partai justru merupakan bagian dari problem lemahnya representasi politik. Sebagian besar partai-partai politik kita tidak mewakili gagasan dan kepentingan vital rakyat pada umumnya. Namun perbaikan harus dilakukan disektor yang strategi ini. Bagaimanapun Partai Politik masih merupakan instrument demokrasi yang sangat penting!

Dengan begitu menjadi penting bagi gerakan pro-demokrasi di tingkat lokal untuk berani melakukan upaya revitalisasi berbasis representasi lokal. Dengan fokus setidaknya pada instrument-instrumen terburuk demi perbaikan dan partisipasi. Ada dua agenda demonopolisasi yang sekurangnya bisa dilakukan ditingkat lokal. Yakni, dengan masuk ke ruang-ruang politik negara, salah satunya lewat kekuatan politik kepartaianalternatif tingkat lokal, parlemen dan pemerintahan di tingkat lokal, sebagai blok-politik baru, bukan pemain individual, dan dengan *rule of the game* yang baru bermekanisme control rakyat dan berbasis konstituen kerakyatan yang jelas dan meingkngakar serta berbasis konstituensi yang lebih pluralis bersifat lintas-agama dan lintas-etnis.

Juga penting untuk melakukan upaya masuk ke ruang politik kewarganegaraan seperti BPD (Badan Perwakilan Desa) atau DPD (Dewan Perwakilan Daerah) partisipasi langsung, representasi kepentingan riel berbasis “kelas” dan eksperimentasi ke *local governace politics* dengan memanfaatkan momentum pemilihan kepala daerah langsung. Selain juga mulai melakukan penguatan control rakyat terhadap partai-partai politik, korupsi birokratik dan bangkitnya rezim “maling-maling lokal”. Termasuk juga upaya untuk membangun *new social-pact* dalam rangka memperkuat basis gerakan demokrasi ditingkat lokal, kemudian antar-wilayah, dan berjejaring nasional, sambil mengerjakan defragmentasi gerakan sosial-politik ketika konsolidasi demokrasi.

Selain itu ada dua hal yang juga penting untuk diperhatikan. Pertama, adanya aturan yang jelas dan tegas tentang partai politik lokal. Selain ketentuan tentang persyaratan, hak, dan kewajiban partai nasional dan lokal. Ketentuan melarang aspirasi separatism dan sikap yang bermusuhan dan diskriminasi terhadap kelompok lain dapat menjadi bagian dari aturan tentang partai politik lokal. Hal ini penting, karena tanpa kedewasaan dan pengaturan yang jelas kehadiran partai lokal ini akan menjadi masalah baru bagi kemajemukan itu sendiri. Kedua, pengaturan sistem kepartaian akan menjadi pekerjaan yang mubazir, jika masyarakat sendiri tidak memiliki *political literacy* yang memadai. Bagaimanapun juga pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya tidak dapat hanya terbatas pada tataran procedural semata. Kita semua mempunyai tanggung jawab berupa peningkatan kesadaran politik rakyat melalui pendidikan politik. Keberhasilan agenda ini diharapkan mampu mengatasi setidaknya meminimalisir kecenderungan *disillusioned voting*.

Dialog Kuede KUPI Maret 2008 di Kuede KUPI Uleekareng di Banda Aceh, dengan pembicara Ahmad Taufan Damanik (KKSP) dan Agung Wijaya (DEMOS)



**MENGGAGAS
SISTEM
KESEJAHTERAAN
BAGI
MASYARAKAT
ACEH**

*Perspektif Sosial Demokrasi
Rasa Kopi Aceh*

MENGGAGAS SISTEM KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT ACEH

Kata kesejahteraan merupakan jargon yang paling seksi yang diungkapkan oleh para pejabat negara dan politisi saat kampanye maupun pidato kenegaraan. Jika kita mengkonkretkan dalam bentuk sistem dan program maka kata “kesejahteraan” disandingkan dengan konstitusi Negara menjadi lebih bermakna? Bagaimana sebenarnya mewujudkan kesejahteraan tersebut kedalam system dan program kehidupan bernegara?

Konstitusi Indonesia telah mengalami 4 kali amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai semangat yang kuat akan kesejahteraan warga negaranya. Pembukaan memuat kewajiban negara dalam mengelola semua sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola sumber daya demi menciptakan lapangan kerja, mengatasi kemiskinan, pelayanan

pendidikan dan kesehatan. Untuk menerapkan hal tersebut dalam kebijakan sangat tergantung dari kemampuan negara dalam mengelola ekonomi, perdagangan dan mekanisme yang memungkinkan untuk itu.

Kita ketahui Indonesia memiliki produk Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, kesejahteraan masyarakat ini tertuang dalam bentuk sistem jaminan sosial nasional. Meskipun program sistem jaminan sosial nasional ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dapat dilihat dari peraturannya masih bersifat parsial dan tumpang tindih, manfaat yang belum optimal dan jangkauan program masih terbatas, serta hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat. Akan tetapi ini langkah yang paling reformis setelah Indonesia merdeka.

Berkaca ke negara-negara Eropa Barat, beberapa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah seperti: pendidikan, kesehatan, jaminan hari tua dan kecelakaan kerja. Sumber dana untuk membiayai pelayanan-pelayanan tersebut diperoleh dari iuran warga negara (pekerja), iuran dari pengusaha dan sebagian diambil dari kas negara. Sedangkan di negara Amerika Serikat, hal ini diserahkan sepenuhnya kepada setiap warga negara melalui sistem asuransi swasta mandiri. Untuk warga negara yang miskin dan menganggur diberikan bantuan untuk pelayanan kesehatan melalui program Medicaid dan untuk yang sudah lanjut usia mendapatkan santunan dari program Medicare.

Sugeng Bahagijo (*Associate Director Perkumpulan Prakarsa*)

Banda Aceh dan Provinsi Aceh sedang dalam masa pemulihan dan pembangunan kembali pasca tsunami dalam berbagai sisi kehidupan: ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Lima tahun ke depan, agenda pemulihan dan pembangunan kembali akan menjadi agenda utama. Akan tetapi, kita juga perlu



memikirkan dan merencanakan masa kini dan masa depan yang lebih baik bagi semua warga sesudah semua kerja keras masa depan yang lebih baik lagi bagi semua warga sesudah semua kerja keras masa recovery dan rekonstruksi. Salah satu yang penting dipikirkan, direncanakan dan diwujudkan adalah sistem kesejahteraan sosial (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya).

Demokratisasi sedang berjalan di bumi Aceh dengan adanya Pilkada untuk memilih kepala daerah. Ini adalah kesempatan emas untuk memilih pemimpin yang cocok dengan kebutuhan dan aspirasi, pemimpin yang jujur, penuh komitmen kepada nasib warga dan akan bekerja keras memenuhi hak-hak sosial ekonomi warga Aceh. Akan tetapi, kesempatan emas ini bisa hilang jika yang berkompetisi politik tidak disertai komitmen nyata dan rencana yang jelas bagi sistem kesejahteraan. Sebab kompetisi politik tanpa rencana-rencana konkret perbaikan nasib warga secara sosial ekonomi hanya akan menjadi politik procedural, bukan politik substantif. Demokrasi mestinya bukan hanya soal Pemilu atau Pilkada, tapi juga soal niat, kebijakan dan sistem untuk mensejahterakan kehidupan warga negara.

Pengalaman negara-negara kesejahteraan pun di Eropa menunjukkan bahwa capaian-capaian negara kesejahteraan merupakan kreasi dari politik (dari elit politik dan warga negara), bukan sekadar hasil alamiah pertumbuhan ekonomi dan sistem ekonomi pasar. Oleh karena itu, memikirkan peluang dan strategi bagi penyusunan dan penciptaan sistem kesejahteraan sosial merupakan keharusan baru yang harus dimulai, jika ide atau gagasan itu sudah ada dan tersusun, maka bagaimana ide dan gagasan itu bisa diwujudkan menjadi kelembagaan dan praktik baik oleh elit politik, pemerintah dan menjadi titik tolak bagi peran dan kegiatan warga negara.

Sekilas Negara Kesejahteraan

Masyarakat modern dituntut untuk mencegah berlangsungnya kerentanan situasi sosial dan kerentanan subsistensi (Offe, 1997). Dalam bahasa sederhana, masyarakat berkewajiban untuk memastikan tersedianya lapangan kerja yang cukup dan juga perlindungan sosial yang memadai bagi anggota-anggotanya. Kerentanan muncul saat dua hal tersebut tidak berhasil dipenuhi.

Berbagai bentuk tatanan kelembagaan yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat modern tidak pernah bisa dilepaskan dari kebutuhan untuk mengatasi kerentanan-kerentanan tersebut. Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan bentuk kreasi kelembagaan dari masyarakat Eropa Barat dan Utara sejak paruh akhir abad XIX sebagai respon atas kebutuhan itu.

Negara kesejahteraan dapat dipahami sebagai “sebentuk tatanan kelembagaan yang bersendikan peran negara yang aktif dalam mengelola perekonomian yang didalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan sosial dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya” (Andersen, 1990). Negara kesejahteraan dicirikan oleh peran negara yang signifikan untuk menjamin tiga hal, yaitu: penciptaan kesempatan kerja penuh (*full employment*), pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial bagi warga negara. Di satu sisi, hak sosial tidak seharusnya menjadi dis-insentif bagi warga untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja (*labour market*), sehingga negara harus menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang aktif (*active labour policy*) untuk mendorong partisipasi penuh warga dalam pasar tenaga kerja. Disisi lain, luasnya basis hak sosial membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai melalui sistem perpajakan yang kuat yang hanya dimungkinkan melalui pertumbuhan ekonomi dengan

peran aktif pemerintah didalamnya. Segitiga antara peran negara dalam pertumbuhan ekonomi-jaminan hak sosial-kebijakan aktif tenaga kerja merupakan karakteristik kunci dari suatu negara kesejahteraan.

Pada dasarnya, dalam tatanan negara kesejahteraan, negara memberikan perlindungan sosial kepada warga sebagai pengakuan atas hak mereka sebagai warga negara (*the granting of social citizenship*). Negara berusaha secara aktif untuk membebaskan warga negara dari ketergantungan terhadap mekanisme pasar untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar mereka (dekomodifikasi). Secara umum, merujuk pada Titmuss (1958) telah mengidentifikasi adanya dua tipologi negara kesejahteraan, yaitu *residual welfare state* dan *institutional welfare state*. *Residual welfare* mengasumsikan tanggung jawab negara sebagai penyedia kesejahteraan berlaku jika dan hanya jika keluarga dan pasar gagal menjalankan fungsinya serta terpusat pada kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti kelompok marjinal serta mereka yang “patut” mendapatkan alokasi kesejahteraan dari negara. Sedangkan *institutional welfare* bersifat universal, mencakup semua populasi warga, serta terlembagaan dalam basis kebijakan sosial yang luas dan vital bagi kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sama seperti halnya dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya (kecuali Singapura), memiliki sistem kesejahteraan sosial yang lebih terbatas. Krisis ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa suatu sistem kebijakan sosial yang memadai harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan untuk memampukan negara menjamin kesejahteraan warganya (Gough, 2000). Namun sistem yang dikembangkan di Indonesia masih jauh tertinggal. Gough (2004) menggolongkan Indonesia sebagai “*less institutionally developed and differentiated*” dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pierson (2004), saat menganalisis kasus-kasus adopsi negara kesejahteraan dikalangan

late adopters juga menyimpulkan bahwa Indonesia berada dibelakang negara-negara lain di Asia Tenggara.

Kajian yang dilakukan Lindenthal (2004) mengidentifikasi karakteristik umum system perlindungan sosial yang telah berkembang di Indonesia selama ini sebagai berikut: (1) Cakupan sistem jaminan sosial yang terbatas, yang hanya melayani minoritas populasi, khususnya pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan sebagian kecil pegawai sektor swasta. Sejauh ini, sistem yang dikembangkan secara keseluruhan hanya mampu mencakup kurang dari 20 persen populasi Indonesia (2) Ketergantungan yang kuat pada keluarga (inti maupun *extended family*) serta komunitas untuk memberikan perlindungan sosial informal terhadap hilangnya pendapatan, gangguan kesehatan ataupun musibah lainnya (3) Ketergantungan yang terbatas (*limited reliance*) pada majikan/perusahaan, melalui peraturan perburuhan yang didesakkan melalui kesepakatan kolektif, untuk menyediakan *benefit* seperti upah semasa sakit atau cuti melahirkan dan kompensasi saat pemutusan hubungan kerja (4) Pilihan jaminan sosial yang terbatas bagi pekerja di sektor swasta dengan tumpuan pada skema dana pension bagi pemberian *lump sum* saat berhenti bekerja (5) Paket *benefit* sosial yang relative lebih komprehensif bagi pegawai negeri dan anggota angkatan bersenjata, dibandingkan dengan yang diterima oleh kelompok masyarakat lainnya (6) Tunjangan sosial (*social assistance/services*) pada penduduk miskin berbasis subsidi yang tidak memadai, serta memiliki tingkat kebocoran dan biaya administrasi yang tinggi (7) Sistem kesehatan publik yang tidak didanai dengan memadai serta tidak mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada seluruh warga. Sistem jaminan sosial di Indonesia secara umum bersifat *contributory*, dimana sebagian besar sumber pendanaan bertumpu pada kontribusi pekerja dan pemilik usaha, sedangkan pemerintah hanya menanggung sebagian dari kebutuhan tersebut khususnya yang terkait dengan pengurangan kemiskinan.

Peluang Bagi Aceh

Terlepas dari masih terbelakangnya sistem yang ada di tingkat nasional, desentralisasi membukakan peluang untuk membangun sistem tersebut melalui inovasi-inovasi di tingkat lokal (*welfare district or provinces*). Eko (2006) melihat bahwa walaupun dalam desentralisasi sebagian besar daerah belum mampu mempromosikan kesejahteraan bagi warganya. Namun, terdapat juga beberapa daerah yang telah berusaha mempromosikan kesejahteraan baik melalui kebijakan yang menyeluruh maupun kebijakan parsial. Eko (2006) membagi kabupaten dan kota Indonesia yang menjadi empat kelompok, yaitu: (1) Daerah lemah (pendapatan rendah, belanja sosial rendah) (2) Daerah budiman (pendapatan rendah, belanja sosial tinggi) (3) Daerah pelit (pendapatan tinggi, belanja sosial rendah) (4) Daerah sejahtera (pendapatan tinggi, belanja tinggi). Eko (2006) juga mencatat bahwa daerah-daerah yang berusaha mempromosikan kesejahteraan warganya umumnya menggunakan kebijakan-kebijakan unggulan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: (1) Kebijakan pengurangan kemiskinan (2) Pemberdayaan ekonomi lokal (3) Perbaikan pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan) (4) Alokasi dana desa.

Sutoro mengungkapkan bahwa paling tidak sudah terdapat 15 kabupaten/kota yang menempuh jalur promosi kesejahteraan tersebut, antara lain Kabupaten Jember dan Kota Blitar. Hanya saja, inisiatif-inisiatif tersebut kebanyakan masih sangat tergantung pada komitmen politik pemimpin local dan belum terlembagakan secara sistemik.

Salah satu patokan/ukuran utama untuk melihat hasil pembangunan dan mutu kesejahteraan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau HDI (Human Development Index). Di Indonesia secara nasional, belanja sosial (pendidikan, kesehatan, dan lainnya) Indonesia sebelum dan sesudah krisis

ekonomi 1997, masih menyedihkan. Belanja sosial Indonesia masih lebih rendah (3 persen PDB) ketimbang negara-negara tetangga seperti Malaysia, Philipina, dan Thailand (diatas 5 persen PDB). Karena itu, meskipun pertumbuhan ekonomi sebelum krisis dan pemulihan pasca krisis tahun 2000-2006 kurang lebih sama bahkan lebih besar, derajat human development (HDI) Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga. Dalam laporan *Human Development Report* Indonesia tahun 2004 telah diajukan agar Indonesia menaikkan belanja sosialnya menjadi rata-rata 5,8 persen (Kementrian Koordinator Bidang Kesra Republik Indonesia, 2006, “Informasi Dasar: Kongres NAsional Pembangunan Manusia Indonesia 2006).

Dalam skala Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) nasional (data tahun 2004), provinsi NAD menempati peringkat 18, lebih baik dan tinggi ketimbang provinsi Lampung 19, dan Jawa Timur 23, Banten 20. Namun peringkat NAD masih jauh lebih redah ketimbang provinsi Sumatera Utara 7, Sumatera Barat 9, dan Jawa Tengah 17. Di kalangan kota dan kabupaten di Indonesia, Kota Banda Aceh menempati peringkat 34, jauh lebih baik ketimbang Kota Toba Samosir 42, Palembang 52, Bogor 35, bahkan dengan kota Surabaya 40. Namun, peringkat Kota Banda Aceh ini masih dibawah capaian Kota Medan 24, Kota Padang Panjang 10, dan Kota Metro Lampung. Akan tetapi, peringkat lumayan baik itu tidak diiringi oleh capaian kota dan kabupaten lain di luar Kota Banda Aceh. Misalnya, peringkat baik adalah Sabang 74 dan Lhokseumawe 68, Bireun 95. Akan tetapi kabupaten lainnya memiliki peringkat yang jauh dibawah misalnya Aceh Jaya 302, Langsa 159 dan Simeulu 358 (Informasi Dasar: Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia” 2006, hal 81-92).

Pasca tsunami menghancurkan kebijakan pembangunan dan kebijakan sosial di Aceh untuk lebih sungguh-sungguh



menciptakan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi. Apalagi pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi KOnvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman negara-negara kesejahteraan dan mencapai tingkat, maka perlu berbagai kebijakan dan kelembagaan kesejahteraan ekonomi. Warga negara, aktivis, dan elit-elit politik perlu memikirkan dan merumuskan apa saja yang bisa dilakukan. Apa saja kebijakan dan kelembagaan kesejahteraan yang perlu disusun dan dikerjakan? Apakah ada contoh di Indonesia?

Jembrana misalnya, sistem kesejahteraan sosial yang baik itu ternyata bisa dilakukan. Di Jembrana telah berjalan: (1) JKJ (Jaminan Kesehatan Jembrana), program ini mencakup 100 persen warga Jembrana (2) Pendidikan yang murah dan terjangkau (SPP gratis) (3) Asuransi jiwa untuk semua warga Jembrana (4) Bantuan ekonomi untuk usaha masyarakat. Berbagai program tersebut sudah berjalan 5 tahun terakhir ini, dan sudah menarik banyak pihak untuk belajar dari Jembrana. Darimana sumber pendanaannya? Jembrana seperti daerah lain mengandalkan dana dari dana pusat dan pendapatan asli daerah (PAD), selain itu hasil efisiensi dan penghematan (belanja dan konsumsi birokrasi) di berbagai bidang (menarik PNS ke dalam satu gedung, tak membeli kendaraan baru, merampingkan jumlah dinas, mematok harga barang dan jasa, membuat perbaikan keluar masuk barang-barang pemerintah melalui satu pintu, dan lain-lain). Jika di tingkat nasional ditetapkan belanja pendidikan sebesar 20 persen APBN, maka di Jembrana, belanja pendidikan sudah melampauinya, yakni 30 persen APBD. Termasuk diantaranya untuk mendanai kegiatan SPP gratis.

Lalu apakah ada peluang bagi kota seperti Banda Aceh menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang lebih baik ketimbang sekarang? Jawaban singkatnya, bisa! Kalau kabupaten

Jembrana bisa, maka Kota Banda Aceh juga bisa. Secara aset manusia, sumberdaya dan sumber dana, Aceh memiliki syarat-syarat sebagai daerah yang kaya. NAD juga memiliki banyak kaum cerdas pandai. Kini tinggal elit-elit politik dan warga negara sendiri, maukah dan mampukah memancang system kesejahteraan sosial itu?

Kini yang penting bukan hanya *how to win election*, tetapi juga *how to govern*, yakni membuktikan diri nantinya sebagai pemerintah yang lebih baik dan akan menciptakan system kesejahteraan yang lebih baik. Misalnya, para elit politik selain berjanji akan menuntaskan berbagai fasilitas umum dan pembangunan fisik, maka 3 hal berikut perlu menjadi bahan pikiran dan pertimbangan: (1) Bagaimana membuat realokasi APBD untuk lebih memperkuat dan menaikkan belanja sosial khususnya untuk jaminan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat (antara lain seperti Grameen Bank-Muhammad Yunus) (2) Bagaimana menjalankan penguatan, perbaikan dan penataan ulang kinerja birokrasi dan dinas-dinas pemerintah agar pelayanan agar pelayanan umum menjadi makin mudah, makin bermutu dan responsive (3) Bagaimana menata ulang dan menyusun berbagai peraturan daerah atau qanun untuk mengatur dan menjamin berjalannya berbagai system kesejahteraan sosial.

Dialog Kuede KUPI Juli 2008 di Kuede KUPI Uleekareng di Banda Aceh, dengan pembicara: Sugeng Bahagijo (Associate Director Perkumpulan Prakarsa).

Daftar Istilah

ABAS, Aceh Barat Selatan

Akar rumput (grassroot)

ALA, Aceh Leuser Antara

Atjeh, sebutan Aceh dalam ejaan lama

Benefit, kegunaan

BRA, Badan Reintegrasi Aceh

BPS, Badan Pusat Statistik

BRR, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Civil society, Masyarakat Sipil, Masyarakat Madani

DPD, Dewan Perwakilan Daerah

DPRA, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

DPRK, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

DOM, Daerah Operasi Militer

FES, Friedrich Ebert Stiftung

Full employment, penggunaan tenaga kerja penuh dimana tingkat pengangguran kurang dari 4%

Fragmentasi, perpecahan dari satu sistem politik, menjadi beberapa sub-sistem dan unit

Fundamentalisme, paham kepanutan teguh pada pokok ajaran kepercayaan

Gampong, kampong, desa

GAM, Gerakan Aceh Merdeka

HDI, Human Development Index



JKA, Jaminan Kesehatan Aceh

KDRT, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keude KUPI, warung kopi dalam bahasa Aceh

KPA, Komite Peralihan Aceh

Mukim, Struktur pemerintahan Aceh dan struktur adat di atas Gampong/desa

NAD, Nanggroe Aceh Darussalam

NGO, Non Governmental Organization, lembaga non pemerintah

Orba, Orde Baru

Orla, Orde Lama

Ormas, Organisasi Massa, organisasi masyarakat

Parpol, Partai Politik

Parlok, Partai Politik Lokal

Patriarki, memosisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai subordinat.

PA, Partai Aceh

PAAS, Partai Aceh Aman Sejahtera

PBA, Partai Bersatu Atjeh

PDA, Partai Daulat Aceh

Pemilu, Pemilihan Umum

Pemilukada, Pemilihan Umum Kepala Daerah

Politik Identitas, tindakan politis yang mengedepankan kepentingan dari kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, berbasiskan ras, etnisitas, jender dan keagamaan.

PRA, Partai Rakyat Aceh

Praxis, praksis, secara harafiah; berbuat, bertindak

Quota, bagian yang harus diterima

Quo Vadis, kalimat dari bahasa latin yang secara harfiah; mau kemana atau kemana arahnya?

Reformis, penyokong perubahan atau pembaharuan

Reformasi, perubahan

Residual, terus-menerus

RI, Republik Indonesia

Sarak opat, penyebutan tuha peut di dataran tinggi Gayo

SEFA, Save Emergency for Aceh

SIRA, Suara Independen Rakyat Aceh

Sosdem, Sosial Demokrasi

Stakeholder, kelompok kepentingan

SWT, subhaanahu wa ta'ala

Teungku atau Tgk, orang yang pandai dalam ilmu agama Islam, panggilan kehormatan untuk orang Aceh

The granting of social citizenship, perlindungan sosial dari negara kepada setiap warga sebagai pengakuan atas hak mereka.

Tuha Peut, sebutan adat di struktur pemerintahan desa di Aceh

Trickle down effect, teori ekonomi yang meprioritaskan pertumbuhan ekonomi, baru kemudian pemerataan

UUD, Undang-Undang Dasar

UUPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Welfare state, konsep negara kesejahteraan

dialog KEUDE KUPI

Keude KUPI merupakan bagian dari sejarah dan dinamika hidup masyarakat Aceh. Banyak hal besar yang lahir, justru bermula dari perbincangan di keude kUPI. Perbincangan tentang hidup sehari-hari hingga bicara soal ekonomi politik dan bahkan fenomena di dunia internasional.

Ruang di keude kUPI adalah kesetaraan, disini tak ada hubungan pangkat dan jabatan, tuan dan pua atau atasan dan bawahan. Perbincangan lepas di keude kUPI menyimpan aura kebebasan dan persahabatan yang kental. Kiranya dengan alasan itulah SEFA sejak tahun 2006 menggagas diskusi publik yang kini dikenal dengan Dialog Keude KUPI (DKK).

Dialog Keude KUPI memberi cita rasa lain dengan tema-tema aktual yang dikupas bersama di suasana santai namun berkualitas. Berbagai pembicara yang hadir di forum DKK menawarkan nuansa berbeda. Para pengambil kebijakan seperti pemerintah, legislatif, pengamat, akademisi, aktivis sosial, kaum dayah hingga politisi, merasa forum ini telah membawa model baru bagi komunikasi sosial-politik di Aceh, membahas yang “berat” menjadi ringan, mengupas yang “rumit” menjadi “sederhana”. Orisinalitas isu dan konsep dari tema-tema yang dibahas dalam buku ini dapat dibingkai dalam satu simpulan, inilah perspektif sosial demokrasi rasa kUPI Aceh.



**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

ISBN : 978-979-1157-26-1

